

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN KOTA BEKASI



KERJASAMA

**DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA BEKASI**

DENGAN

**FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN 2025**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi Tahun 2025

Tim Peneliti : Yayat Heryatno, SP, MPS
Prof. Dr. Ir. Budi Setiawan, MS
Mutiah Mardatillah
Afifah Hasya Putri Adinta, S.Hut
Karin Zikra Nisya

Tahun Penelitian : 2025

Biaya Studi : 100.000.000

Lembaga Mitra : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

Bogor, 01 Desember 2025

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekologi Manusia



Prof. Dr. Sofyan Sjaf
197810032009121003

Peneliti



Yayat Heryatno, SP., MPS
196901121996011003

TIM PENYUSUN

Yayat Heryatno, SP., MPS

Prof. Dr. Ir. Budi Setiawan, MS

Mutiah Mardatillah

Afifah Hasya Putri Adinta, S.Hut

Karin Zikra Nisya

KATA PENGANTAR

Ketahanan pangan menyangkut ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pengadaannya. Di samping aspek produksi, ketahanan pangan mensyaratkan pendapatan yang cukup bagi masyarakat untuk mengakses bahan pangan, keamanan pangan, serta aspek distribusi. Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas yang sangat kompetitif di pasar internasional, Indonesia menghadapi tantangan berat dalam merumuskan kebijakan pangan yang mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Kebijakan pangan yang dimaksud antara lain adalah upaya mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan ragam komoditas pangan dan upaya peningkatan diversifikasi ketersediaan dan konsumsi pangan.

Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan salah satu instrumen data statistik yang dapat memberikan informasi mengenai situasi ketahanan pangan di suatu wilayah, khususnya untuk aspek ketersediaan pangan, baik di tingkat nasional maupun provinsi dan kabupaten/kota. Melalui analisis situasi ketersediaan pangan secara kuantitatif dengan menggunakan NBM yang memberikan informasi mengenai data produksi, pengadaan serta semua perubahan yang terjadi di suatu wilayah dapat diketahui sejauh mana kondisi bahan makanan yang tersedia dan siap untuk dikonsumsi penduduk. Penyusunan dan analisis NBM mencakup beberapa kegiatan yang didasarkan pada kaidah manajemen yaitu perencanaan yang diawali dari analisis data sampai dengan mengkomunikasikannya ke stakeholders sehingga diperoleh umpan balik untuk penyempurnaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan upaya di atas, pada tahun anggaran 2025, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi secara khusus telah melaksanakan kegiatan Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi.

Dalam konteks pembangunan, NBM yang secara khusus menyajikan informasi penting tentang situasi ketersediaan pangan tersebut mempunyai arti yang sangat strategis. Informasi yang dikandung dalam NBM berguna sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan ketahanan pangan. Dengan demikian dapat dibuat perencanaan yang lebih tepat dan dijadikan dasar penyusunan strategi penyediaan pangan yang beragam, bergizi dan berimbang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyusunan NBM Kota Bekasi. Semoga informasi yang disajikan dalam NBM ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait dengan pembangunan ketahanan pangan.

Bekasi, November 2025

Tim Penyusun

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program peningkatan ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam pembangunan di Indonesia. Pencapaian ketahanan pangan nasional yang diawali dengan perwujudan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Negara atau wilayah dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik jika mampu menyelenggarakan pasokan pangan yang stabil dan masing-masing rumah tangga mampu memperoleh pangan sesuai kebutuhannya. Dengan demikian, terdapat suatu jaminan bagi seluruh penduduk untuk memperoleh pangan dan gizi yang cukup untuk menghasilkan generasi yang sehat dan cerdas.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Undang-undang Pangan No.18 Tahun 2012). Pemantapan ketahanan pangan merupakan salah satu fokus dari pembangunan nasional yang dilaksanakan di setiap daerah. Perwujudan ketahanan pangan dapat dicapai melalui empat pilar yaitu: (1) ketersediaan pangan; (2) cadangan pangan; (3) penganekaragaman konsumsi pangan; dan (4) pencegahan dan penanggulangan masalah pangan. Dengan demikian, ketersediaan pangan wilayah merupakan prasyarat terwujudnya ketahanan pangan penduduk.

Situasi ketersediaan pangan menunjukkan jumlah dan jenis pangan yang tersedia untuk penduduk yang akan mengalami variasi dari waktu ke waktu maupun antara satu tempat dengan tempat lain. Hal tersebut sangat tergantung pada kondisi lingkungan baik politik, iklim, jenis tanah, teknologi pertanian, cara penyimpanan pangan, sarana transportasi dan pemasaran. Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan salah satu instrumen data statistik yang dapat memberikan informasi mengenai situasi ketahanan pangan di suatu wilayah, khususnya untuk aspek ketersediaan pangan, baik di tingkat nasional maupun provinsi dan kabupaten/kota. Melalui analisis situasi ketersediaan pangan secara kuantitatif dengan menggunakan NBM yang memberikan informasi mengenai data produksi, pengadaan serta semua perubahan yang terjadi di suatu wilayah dapat diketahui sejauh mana kondisi bahan makanan yang tersedia dan siap untuk dikonsumsi penduduk.

Penyusunan dan pengembangan NBM mencakup beberapa kegiatan yang didasarkan pada kaidah manajemen yaitu perencanaan yang diawali dari analisis data sampai dengan mengkomunikasikannya ke stakeholders sehingga diperoleh umpan balik untuk penyempurnaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan upaya di atas, pada tahun anggaran 2025, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi bekerjasama

dengan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor telah melaksanakan kegiatan Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi. Secara umum kajian ini bertujuan untuk menghitung dan menganalisis situasi ketersediaan pangan di wilayah Kota Bekasi berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Tahun 2023 dengan pendekatan Pola Pangan Harapan. Secara lebih khusus kajian ini bertujuan untuk : 1). Menghitung situasi penyediaan dan menganalisis tingkat ketersediaan pangan di wilayah Kota Bekasi; dan 2) Menganalisis kuantitas dan kualitas ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk di wilayah Kota Bekasi berdasarkan skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Desain yang digunakan dalam kajian ini adalah *descriptive quantitative dan explorative study* dengan menggali sebanyak-banyaknya data dan informasi untuk merumuskan karakteristik khas dari subjek yang dikaji secara deskriptif. Fokus utama dalam kajian ini adalah analisis situasi penyediaan dan ketersediaan pangan wilayah serta kualitas ketersediaan pangan yang tersedia untuk konsumsi penduduk di wilayah Kota Bekasi yang didasarkan pada hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi Tahun 2024. Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi dilaksanakan selama 3 (tiga bulan efektif) dari bulan Juli sampai dengan September 2025. Adapun lingkup kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan desain analisis yang dikembangkan adalah sebagai berikut: inventarisasi bahan pustakan, inventarisasi data sekunder, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan laporan.

Perhitungan dan analisis ketersediaan pangan berdasarkan NBM Kota Bekasi sepenuhnya menggunakan data sekunder tahun 2024 yang diperoleh dari dinas/intansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi, khususnya : Badan Pusat Statistik; Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; serta intansi-intansi terkait lainnya. Jenis data dasar yang dikumpulkan dan digunakan untuk menghitung NBM mencakup data jumlah produksi, perubahan stok, impor, dan ekspor pangan selama satu tahun. Berbagai teknik perhitungan serta faktor konversi yang digunakan dalam menyusun Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi mengacu pada Buku Panduan Neraca Bahan Makanan Nasional yang disusun oleh Badan Pangan Nasional Tahun 2024. Perhitungan dan penyusunan NBM dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Analisis Neraca Bahan Makanan yang dikembangkan atas kerjasama tim Badan Ketahanan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian dan tim Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia – Institut Pertanian Bogor.

Salah satu ukuran tingkat kemandirian pangan wilayah adalah dengan menelaah tingkat swasembada pangan yang diukur berdasarkan seberapa besar penyediaan pangan dalam suatu wilayah dapat dipenuhi dari hasil produksi di wilayah sendiri. Disisi lain dapat pula dikaji dari sudut Tingkat ketergantungan yang diukur berdasarkan besarnya penyediaan pangan dalam suatu wilayah yang harus dipenuhi melalui impor pangan dari luar daerah. Secara sederhana tingkat ketergantungan wilayah diukur berdasarkan tingkat atau perbandingan yang dinyatakan dalam

persen antara jumlah impor dengan total penyediaan pangan dalam wilayah yang merupakan hasil perhitungan jumlah produksi ditambah perubahan stok dan impor dikurangi ekspor. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan jumlah impor pangan akan melebihi jumlah penyediaan dalam wilayah dengan kata lain Tingkat ketergantungan terhadap impor lebih dari 100 persen.

Berdasarkan data Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi tahun 2024, Sebagian besar pangan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk di wilayah Kota Bekasi diperoleh dari pasokan dari luar daerah. Estimasi volume total penyediaan pangan di wilayah Kota Bekasi tahun 2024 mencapai lebih dari 1,358,131 ton yang sebagian besar penyediaannya tergantung pasokan dari luar wilayah (97,3%). Jenis pangan yang penyediaannya dari hasil produksi wilayah Kota Bekasi yang cukup signifikan antara lain beras giling (766,8 ton), ubi kayu (229,5 ton), pisang (2.667,8 ton), pepaya (2.600,8 ton), jambu (2.033,1 ton), bayam (2.242,8 ton), daging sapi (3.271,7 ton), dan daging kambing (2.509,8 ton).

Beras giling merupakan jenis pangan kelompok padi-padian yang paling dominan penyediaannya dengan total ketersediaan mencapai 388.028,1 ton (147,7 kg/kapita) per tahun. Ubi kayu adalah kelompok komoditas makanan berpati yang paling dominan ketersediaannya yaitu sekitar 41.759,3 ton (15,9 kg/kapita) per tahun. Ketersediaan gula pasir mencapai 21.697,8 ton (8,3 kg/kapita) per tahun. Sementara itu, ketersediaan pangan kelompok buah/biji berminyak yang paling dominan adalah kacang kedelai yang mencapai sekitar 38,956,5 ton (114,8 kg/kapita) per tahun. Rata-rata ketersediaan pangan kelompok buah-buahan yang paling banyak ketersediaannya adalah jeruk (29.907,1 ton atau sekitar 11,4 kg/kapita). Adapun komoditas pangan kelompok sayuran yang tingkat ketersediaannya paling tinggi adalah cabai yaitu sekitar 30.217,9 ton (11,5 kg/kapita).

Sementara itu, komoditas pangan utama kelompok pangan hewani dengan tingkat ketersediaan paling tinggi di Kota Bekasi adalah daging ayam ras yaitu sekitar 39.387,9 ton (15,0 kg/kapita) per tahun. Tingkat ketersediaan telur ayam ras untuk konsumsi penduduk di wilayah Kota Bekasi pada tahun 2024 mencapai sekitar 28.934,5 ton (11,0 kg/kapita). Sementara itu, produk susu impor ketersediaannya mencapai 15.549,7 ton atau rata-rata sekitar 5,9 kg/kapita per tahun. Pangan kelompok ikan yang tingkat ketersediaannya paling tinggi pada tahun 2024 adalah ikan tongkol yang mencapai sekitar 16.957,4 ton (6,5 kg/kapita). Ketersediaan pangan kelompok minyak dan lemak sebagian besar dalam bentuk minyak sawit, yaitu sekitar 43.058,1 (16,4 kg/kapita) per tahun. Sementara tingkat ketersediaan minyak kelapa dan lemak relatif kecil dibandingkan dengan tingkat ketersediaan minyak kelapa sawit.

Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata tingkat ketersediaan energi untuk memenuhi kebutuhan penduduk di Kota Bekasi pada tahun 2024 adalah sekitar 2,961 kkal/kapita/hari. Jika dibandingkan dengan Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan

secara nasional berarti Tingkat Ketersediaan Energi (TKE) di Kota Bekasi mencapai sekitar 123,4 %AKE pada tahun 2024. Sementara itu, ketersediaan protein mencapai sebesar 97.6 gram/kapita/hari sehingga Tingkat Ketersediaan Protein (TKP) di Kota Bekasi telah mencapai 157,4 %AKP.

Kelompok pangan padi-padian merupakan penyumbang energi terbesar ketersediaan pangan di wilayah Kota Bekasi yang mencapai sekitar 1.734 kkal energi (72,2 %AKE) Penyumbang ketersediaan energi lainnya yang cukup signifikan kontribusinya adalah kelompok minyak dan lemak, dan kelompok pangan hewani dimana pada tahun 2024 kontribusi energi masing-masing kelompok pangan tersebut berturut-turut mencapai sekitar 434 kkal (18,1 %AKE), dan 307 (12,8 %AKE). Sejalan dengan ketersediaan energinya, kelompok pangan padi-padian dan pangan hewani merupakan penyumbang terbesar terhadap ketersediaan protein di wilayah Kota Bekasi. Pada tahun 2024, sebagian besar protein yang tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk di Kota Bekasi bersumber dari kelompok padi-padian yaitu sekitar 43,2 gram protein (68.6 %AKP) dan kelompok pangan hewani sekitar 32,1 gram protein (51.0 %AKP). Penyumbang ketersediaan protein lainnya yang cukup signifikan kontribusinya adalah kacang-kacangan yaitu sekitar 16,9 gram (26.8 %AKP).

Kelompok pangan yang ketersediaannya telah melebihi angka kecukupannya adalah pangan kelompok padi-padian (lebih 534 kkal atau 22,3 %AKE), pangan hewani (lebih 19 kkal atau 0,8 %AKE, minyak dan lemak (lebih 194 kkal atau 8,1 %AKE), dan kacang-kacangan (lebih 43 kkal atau 1.8 %AKE). Namun demikian, masih terdapat juga kelompok pangan yang kontribusi ketersediaannya masih belum mencapai angka yang dianjurkan untuk masing-masing kelompoknya. Adapun kelompok pangan yang ketersediaan energinya masih dibawah angka kecukupan yang dianjurkan adalah umbi-umbian, buah/biji berminyak, gula, serta lain-lain dimana masih terdapat kekurangan masing-masing sekitar 62 kkal, 69 kkal, 28 kkal, dan 72 kkal per kapita/hari. Secara umum, hasil analisis kualitas ketersediaan pangan di wilayah Kota Bekasi menunjukkan bahwa meskipun kuantitas ketersediaan pangan berdasarkan tingkat ketersediaan energi dan protein di wilayah Kota Bekasi telah melebihi angka kecukupan yang dianjurkan, kualitas ketersediaan pangannya belum mencapai pola pangan ideal. Hal tersebut ditunjukkan dengan capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan di wilayah di Kota Bekasi pada tahun 2024 yang baru mencapai 97.7 atau kurang 2,3 poin dari skor PPH ideal 100.

Situasi penyediaan pangan yang tinggi di suatu wilayah belum menjadi jaminan tercukupinya ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduknya. Pengelolaan, distribusi dan penggunaan pangan di suatu wilayah sampai siap dikonsumsi oleh masyarakat sangat menentukan tingkat ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Selain itu, tingkat ketersediaan pangan yang tinggi secara kuantitas juga tidak menjadi jaminan baiknya kualitas ketersediaan

pangan untuk kebutuhan konsumsi penduduk. Oleh karena itu, selain penguatan kebijakan yang mengatur tata kelola pasokan pangan di wilayah Kota Bekasi, berbagai upaya efisiensi penggunaan pangan untuk kebutuhan non-makanan perlu terus ditingkatkan.

Selain mempertahankan kuantitas tingkat ketersediaan sudah dicapai, ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk di wilayah Kota Bekasi masih perlu ditingkatkan kualitasnya agar lebih beragam dan bergizi seimbang sesuai dengan Pola Pangan Harapan. Komoditas pangan yang masih perlu ditingkatkan jumlah dan kontribusinya adalah kelompok umbi-umbian, buah/biji berminyak, serta sayur dan buah. Jika dikaitkan dengan ketergantungan wilayah terhadap pangan impor untuk kelompok komoditas tersebut yang sedikit lebih rendah dibandingkan kelompok lainnya, khususnya kelompok umbi-umbian dan kacang-kacangan, maka peningkatan ketersediaan kelompok pangan tersebut masih dimungkinkan.

Upaya peningkatan penyediaan pangan yang bersumber dari produksi merupakan alternatif strategis yang dapat ditempuh di wilayah Kota Bekasi, mengingat masih cukup tingginya potensi sumberdaya alam untuk pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan di wilayah Kota Bekasi. Program intensifikasi melalui penguatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana produksi pangan diharapkan dapat meningkatkan hasil produksi pertanian tanaman pangan, peternakan dan budidaya perikanan. Diharapkan akan dapat menambah ketersediaan pangan untuk kebutuhan konsumsi penduduk.

Masih sangat tingginya tingkat ketergantungan ketersediaan energi terhadap pangan kelompok padi-padian, khususnya tepung terigu, dan juga kelompok susu akan menjadi beban perekonomian yang cukup berat bagi wilayah Kota Bekasi dalam upaya penyediaan pangan, karena tingkat ketergantungan untuk kelompok pangan tersebut sangat tinggi. Pengadaan pangan melalui impor dari wilayah lain atau bahkan luar negeri menjadi suatu keharusan yang tidak dapat dihindari untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk di wilayah Kota Bekasi. Oleh karena itu, kebijakan dan program yang terkait dengan penyediaan, pemasaran, dan distribusi pangan di dalam maupun dari dan ke luar wilayah Kota Bekasi harus mendapat perhatian yang serius untuk meningkatkan dan mempertahankan kestabilan ketersediaan pangan wilayah di Kota Bekasi.

Melalui program penguatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana penyimpanan dan distribusi pangan diharapkan dapat menekan tingkat kehilangan pangan akibat tercecer dan rusak selama penyimpanan dan pendistribusian, sehingga sedikit banyak akan meningkatkan ketersediaan pangan untuk kebutuhan konsumsi. Tingkat ketergantungan yang tinggi suatu wilayah terhadap pangan impor secara konseptual tidak menjadi masalah asalkan : (1) PAD yang digunakan untuk mengimpor cukup memadai, (2) analisis secara teknis dan ekonomis untuk wilayah tersebut lebih baik impor daripada produksi, dan (3) ketersediaan pangan tersebut di pasar

regional atau nasional terjamin. Untuk kasus Kota Bekasi, ketergantungan pangan terhadap impor nampaknya bukan menjadi masalah utama. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa (1) secara teknis dan ekonomis wilayah Kota Bekasi kurang layak untuk melakukan kegiatan produksi pangan, khususnya komoditas pangan dimana lahan pertanian menjadi faktor utama produksi (2) sumberdaya atau pendapatan daerah yang tersedia untuk mengimpor pangan relatif memadai, dan (3) kebutuhan pangan di wilayah Kota Bekasi sebagai permintaan pasar bagi wilayah-wilayah lain yang menjadi sentra produksi pangan merupakan potensi investasi daerah di bidang agribisnis.

Strategi lain yang dapat ditempuh adalah dengan perbaikan pola konsumsi pangan masyarakat agar secara bertahap dapat menyesuaikan dengan standar PPH yang dianjurkan. Sejalan dengan perbaikan pola konsumsi, maka penyediaan kelompok pangan yang tingkat ketersediaannya sudah jauh melebihi angka yang dianjurkan dapat diturunkan secara bertahap pula. Namun demikian, penurunan ketersediaan kelompok pangan tersebut harus pula diimbangi pula dengan peningkatan ketersediaan pangan kelompok yang kontribusinya masih rendah, khususnya untuk kelompok umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, serta buah dan sayur-sayuran.

Hasil analisis situasi penyediaan dan tingkat ketersediaan pangan wilayah berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi Tahun 2004 yang telah disusun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan ketahanan pangan, khususnya bidang ketersediaan pangan, di Kota Bekasi di masa yang akan datang. Agar data dan informasi yang disajikan melalui analisis tersebut memiliki relevansi dan akurasi yang memadai untuk penyusunan kebijakan dan perencanaan program ketahanan pangan di Kota Bekasi, maka kegiatan analisis harus dilaksanakan secara reguler dan lebih komprehensif setiap tahunnya.

Selain itu, untuk meningkatkan tingkat akurasi hasil analisis dan kesesuaiannya dengan situasi dan potensi wilayah Kota Bekasi, maka perlu dilakukan kajian secara khusus berbagai faktor konversi dan standar acuan yang digunakan dalam perhitungan dan analisis. Berbagai faktor konversi input dan output serta faktor koreksi tercecceer serta penggunaan pangan untuk pakan dan industri non pangan dan lain-lain perlu didata dan dianalisis secara empirik sesuai dengan kondisi wilayah Kota Bekasi.

Agar hasil kajian tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan sasaran ketersediaan pangan penduduk di wilayah Kota Bekasi dimasa mendatang, maka perlu dilakukan analisis situasi yang paling tidak mencakup data periode terakhir RPJMD Kota Bekasi. Dengan demikian dapat dilakukan analisis tren pertumbuhan pada indikator pokok situasi ketersediaan pangan. Hasil analisis tren pertumbuhan tersebut merupakan salah satu

faktor utama yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam analisis sasaran ketersediaan pangan periode RPJMD berikutnya.

Mengingat saat ini merupakan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045, maka diperlukan pula kajian lebih komprehensif untuk menyusun naskah akademik roadmap pengembangan ketersediaan pangan di Kota Bekasi tahun 2025-2045. Oleh karena itu perlu dilengkapi dengan kajian mendalam tentang rantai pasokan pangan serta tingkat efisiensi penggunaan pangan yang mencakup tingkat *food lost* dan *food waste* pangan di wilayah Kota Bekasi. Dengan demikian, diharapkan dapat disusun berbagai strategi dan alternatif program ketahanan pangan di bidang ketersediaan pangan di wilayah Kota Bekasi yang lebih efektif dan efisien di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
TIM PENYUSUN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	3
C. Kegunaan	3
II. LANDASAN KEBIJAKAN DAN TINJAUAN TEORITIS	4
A. Landasan Hukum dan Kebijakan.....	4
B. Landasan Teoritis dan Metodologis.....	9
III. DESAIN DAN METODE ANALISIS	11
A. Desain dan Cakupan Analisis	11
B. Jenis dan Sumber Data.....	11
C. Pengolahan dan Analisis Data	14
IV. KEADAAN UMUM WILAYAH	21
A. Kondisi Geografis	21
B. Kondisi Agroekologi	23
C. Situasi Demografi	25
D. Situasi Ekonomi.....	26
V. SITUASI PENYEDIAAN PANGAN	30
A. Situasi Penyediaan Per Kelompok Pangan	30
B. Tingkat Penyediaan Per Komoditas Pangan.....	31
VI. TINGKAT KETERSEDIAAN PANGAN	40
A. Situasi Ketersediaan Per Kelompok Pangan.....	40
B. Tingkat Ketersediaan Per Komoditas Pangan	41
VII. KUALITAS KETERSEDIAAN PANGAN	49
A. Ketersediaan Energi dan Protein	49
B. Skor Pola Pangan Harapan	51
VIII. PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel III.B.1.	Jenis dan Sumber Data Pokok Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi.....	12
Tabel III.C.1.	Susunan Pola Pangan Harapan (PPH) Nasional Untuk Tingkat Ketersediaan	20
Tabel IV.A.1.	Data Umum Luas Wilayah Per Kecamatan di Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024	22
Gambar IV.C.1.	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024	25
Tabel V.A.1.	Estimasi Volume Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Per Kelompok Pangan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi	31
Tabel V.B.1.	Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Padi-padian Berdasarkan Data Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi	32
Tabel V.B.2.	Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Makanan Berpati Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi	32
Tabel V.B.3.	Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Gula di Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi.....	33
Tabel V.B.4.	Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Gula Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi.....	34
Tabel V.B.5.	Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Buah-Buahan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi	34
Tabel V.B.6.	Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Buah-Buahan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi	35
Tabel V.B.7.	Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Daging di Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi.....	36
Tabel V.B.8.	Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Telur Berdasarkan Data Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi	37
Tabel V.B.9.	Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Susu Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi.....	38
Tabel V.B.10.	Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Ikan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi	38
Tabel V.B.11.	Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Minyak dan Lemak Berdasarkan Data Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi	39
Tabel VI.A.1.	Ketersediaan Pangan Kelompok Padi-padian Untuk Konsumsi Penduduk Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi	41
Tabel VI.B.1.	Ketersediaan Pangan Kelompok Padi-padian Untuk Konsumsi Penduduk Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi	42
Tabel VI.B.2.	Ketersediaan Pangan Kelompok Makanan Berpati Untuk Konsumsi Penduduk Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi	42

Tabel VI.B.3. Rata-Rata Ketersediaan Pangan Kelompok Gula Untuk Konsumsi Penduduk Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi	43
Tabel VI.B.4. Rata-Rata Ketersediaan Pangan Kelompok Buah/Biji Berminyak Untuk Konsumsi Penduduk Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi.....	43
Tabel VI.B.5. Rata-Rata Ketersediaan Pangan Kelompok Buah-Buahan Untuk Konsumsi Penduduk Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi	44
Tabel VI.B.6. Rata-Rata Ketersediaan Pangan Kelompok Sayuran Untuk Konsumsi Penduduk Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi	45
Tabel VI.B.7. Rata-Rata Ketersediaan Pangan Kelompok Sayuran Untuk Konsumsi Penduduk Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi	46
Tabel VI.B.8. Rata-Rata Ketersediaan Pangan Kelompok Telur Untuk Konsumsi Penduduk Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi	46
Tabel VI.B.9. Rata-Rata Ketersediaan Pangan Kelompok Susu Untuk Konsumsi Penduduk Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi	47
Tabel VI.B.10. Rata-Rata Ketersediaan Pangan Kelompok Ikan Untuk Konsumsi Penduduk Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi	47
Tabel VI.B.11. Rata-Rata Ketersediaan Pangan Kelompok Minyak & Lemak Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi	48
Tabel VII.A.1. Tingkat Kecukupan Ketersediaan Energi dan Protein Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi	50
Tabel VII.A.2. Jumlah dan Kontribusi Ketersediaan Energi dan Protein Menurut Kelompok Pangan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi	50
Tabel VII.B.1. Jumlah, Kontribusi dan Gap Ketersediaan Energi Menurut Kelompok Pangan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi	51
Tabel VII.B.2. Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan Wilayah Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi	53

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program peningkatan ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam pembangunan di Indonesia. Pencapaian ketahanan pangan nasional yang diawali dengan perwujudan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Negara atau wilayah dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik jika mampu menyelenggarakan pasokan pangan yang stabil dan masing-masing rumah tangga mampu memperoleh pangan sesuai kebutuhannya. Dengan demikian, terdapat suatu jaminan bagi seluruh penduduk untuk memperoleh pangan dan gizi yang cukup untuk menghasilkan generasi yang sehat dan cerdas.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Undang-undang Pangan No. 18 Tahun 2012). Program peningkatan ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam pembangunan di Indonesia. Pencapaian ketahanan pangan nasional yang diawali dengan perwujudan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Negara atau wilayah dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik jika mampu menyelenggarakan pasokan pangan yang stabil dan masing-masing rumah tangga mampu memperoleh pangan sesuai kebutuhannya. Dengan demikian, terdapat suatu jaminan bagi seluruh penduduk untuk memperoleh pangan dan gizi yang cukup untuk menghasilkan generasi yang sehat dan cerdas.

Ketahanan pangan menghendaki kecukupan ketersediaan pangan bagi setiap rumah tangga, maupun akses rumah tangga terhadap pangan yang dibutuhkan oleh setiap anggotanya. Pemantapan ketahanan pangan merupakan salah satu fokus dari pembangunan nasional yang dilaksanakan di setiap daerah. Perwujudan ketahanan pangan dapat dicapai melalui empat pilar yaitu: (1) ketersediaan pangan; (2) cadangan pangan; (3) penganekaragaman konsumsi pangan; dan (4) pencegahan dan penanggulangan masalah pangan. Dengan demikian, ketersediaan pangan wilayah merupakan prasyarat terwujudnya ketahanan pangan penduduk.

Ketahanan pangan menyangkut ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pengadaannya. Di samping aspek produksi, ketahanan pangan mensyaratkan pendapatan yang cukup bagi masyarakat untuk mengakses bahan pangan, keamanan pangan, serta aspek distribusi. Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas yang sangat kompetitif di pasar internasional, Indonesia menghadapi tantangan berat dalam merumuskan kebijakan pangan yang mampu

memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Kebijakan pangan yang dimaksud antara lain adalah upaya mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan ragam komoditas pangan dan upaya peningkatan diversifikasi ketersediaan dan konsumsi pangan.

Pembangunan ketahanan pangan menghadapi tantangan dari sisi penyediaan, seperti dampak perubahan iklim, konversi lahan, skala usaha kecil, dan tingginya food loss dan waste. Dari sisi permintaan, tantangan meliputi pertumbuhan penduduk, urbanisasi, akses pangan yang belum merata, serta permasalahan malnutrisi ganda (kurang gizi dan obesitas). Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah perlu melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan dengan memperhatikan aspek ketersediaan, keragaman, dan keamanan pangan yang berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam UU No. 18 Tahun 2012. Selain itu, pemerintah juga diwajibkan membangun Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan gizi.

Ketersediaan pangan merupakan faktor penting dalam memenuhi kebutuhan gizi, terutama untuk peningkatan gizi masyarakat dan merupakan fondasi yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa. Salah satu standar pencapaian pembangunan pangan dan gizi adalah ketersediaan pangan yang memenuhi kebutuhan energi sebesar 2.400 kkal/kapita/hari serta 62 gram protein dengan skor PPH ideal yaitu 100. Kekurangan pangan berpotensi memicu keresahan dan berdampak pada masalah sosial, keamanan dan ekonomi. Situasi ketersediaan pangan menunjukkan jumlah dan jenis pangan yang tersedia untuk penduduk yang akan mengalami variasi dari waktu ke waktu maupun antara satu tempat dengan tempat lain. Hal tersebut sangat tergantung pada kondisi lingkungan baik politik, iklim, jenis tanah, teknologi pertanian, cara penyimpanan pangan, sarana transportasi dan pemasaran. Faktor akses individu dalam menjangkau kebutuhan pangan yang diperlukan merupakan faktor kunci ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Akses individu terhadap pangan yang dibutuhkan sangat dipengaruhi oleh daya beli, tingkat pendapatan, harga pangan, proses distribusi pangan, kelembagaan di tingkat lokal dan faktor sosial lainnya.

Penyediaan pangan sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk merupakan masalah terbesar sepanjang sejarah kehidupan. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya atau cara yang cepat, teliti dan mudah untuk memahami situasi ketersediaan pangan di suatu wilayah pada periode tertentu. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran situasi tersebut dapat dituangkan dalam suatu neraca atau tabel yang disebut dengan Neraca Bahan Makanan (NBM) atau Food Balance Sheet (FBS). NBM disusun untuk memperoleh gambaran atau evaluasi penyediaan pangan mulai dari produksi, pengadaan (pangan masuk/impor, pangan keluar/ekspor, stock) dan penggunaan (pakan ternak, bibit, industri) sehingga tersedia untuk dikonsumsi.

Penyusunan dan pengembangan NBM mencakup beberapa kegiatan yang didasarkan pada kaidah manajemen yaitu perencanaan yang diawali dari analisis data sampai dengan mengkomunikasikannya ke stakeholders sehingga diperoleh umpan balik untuk penyempurnaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan upaya di atas, pada tahun anggaran 2025, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi bekerjasama dengan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor telah melaksanakan kegiatan Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi telah melaksanakan kegiatan Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi.

B. Tujuan

Secara umum kajian ini bertujuan untuk menghitung dan menganalisis situasi ketersediaan pangan di wilayah Kota Bekasi berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Tahun 2024 dengan pendekatan Pola Pangan Harapan. Secara lebih khusus kajian ini bertujuan untuk :

1. Menghitung situasi penyediaan dan menganalisis tingkat ketersediaan pangan di wilayah Kota Bekasi.
2. Menganalisis kuantitas dan kualitas ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk di wilayah Kota Bekasi berdasarkan skor Pola Pangan Harapan (PPH).

C. Kegunaan

1. Sebagai sumber data tentang situasi ketersediaan pangan di tingkat wilayah, khususnya terkait dengan aspek produksi, perubahan stok, impor, dan ekspor pangan serta berbagai bentuk penggunaan pangan di wilayah Kota Bekasi.
2. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah dalam mengevaluasi capaian pembangunan ketahanan pangan di Kota Bekasi, khususnya dalam bidang ketersediaan pangan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
3. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan ketahanan pangan, khususnya dalam upaya menjamin ketersediaan pangan yang mencukupi kebutuhan pangan dan gizi seluruh penduduk di Wilayah Kota Bekasi.

II. LANDASAN KEBIJAKAN DAN TINJAUAN TEORITIS

A. Landasan Hukum dan Kebijakan

Perencanaan pembangunan tidak dapat terlepas dari aspek hukum dan kebijakan pembangunan. Aspek hukum menentukan hal-hal pokok seperti dasar hukum yang mengamankan suatu kegiatan perencanaan, aturan bagaimana dan oleh siapa perencanaan itu dilakukan atau proses administrasinya, bagaimana legalitas suatu proses pembangunan. Aspek kebijakan pembangunan yang erat kaitannya dengan birokrasi, sangat menentukan efektifitas dan efisiensi dari kegiatan perencanaan pembangunan. Bahkan lebih dari itu, kebijakan pembangunan sangat berpengaruh pada operasionalisasi dan keberhasilan implementasi suatu program pembangunan.

Beberapa pertauran dan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan pembangunan sebagai dasar pertimbangan dalam kajian atau analisis terkait pembangunan ketahanan pangan di wilayah Kota Bekasi antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Tentang Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2017-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2012 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);
16. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Pola Pangan Harapan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 387);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2025

19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
21. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13); I - 6 RKPD Kota Bekasi Tahun 2026 33.
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7); 34.
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10);
25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Badan Dan Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 1)

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan yang meliputi Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dilaksanakan untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilaksanakan selama 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun. RPJPD disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), sedangkan RPJMD merupakan penjabaran dari RPJPD. RPJMD disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sementara itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang disusun selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Renstra (Rencana Strategis) SKPD disusun berpedoman pada RPJMD. Renja (Rencana Kerja) SKPD merupakan penjabaran dari Renstra. Renja SKPD disusun berpedoman pada RKPD. RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) SKPD merupakan penjabaran dari Renja SKPD. RKA SKPD dikompilasi menjadi RAPBD. DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran setelah APBD disetujui. DPA disusun berdasarkan penjabaran APBD untuk setiap SKPD.

Pangan merupakan kebutuhan dasar hayati bagi seluruh umat manusia di muka bumi untuk dapat bertahan hidup. Oleh karena itu diperlukan strategi yang efisien dan efektif dalam pengelolaan pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk di suatu wilayah agar dapat hidup secara sehat dan produktif dalam rangka mewujudkan kehidupan yang berkualitas. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Lebih lanjut dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa: 1) Pasal 60 Ayat 1: Pemerintah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif; 2) Pasal 60 Ayat 2: Penganekaragaman konsumsi pangan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal; Pasal 62 : Tercapainya penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang.

Terpenuhinya pangan menjadi hak asasi bagi masyarakat, maka dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam

Pasal 7 huruf m dan Pasal 8, urusan Ketahanan Pangan merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dalam pemenuhan kebutuhan hidup minimal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lampiran menyatakan bahwa penyelenggaraan ketahanan pangan di kabupaten/kota mencakup 4 urusan dan 9 sub-urusan, yaitu: 1), Penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian (urusan daerah kabupaten/kota adalah penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota); 2). Penyelenggaraan ketahanan pangan (urusan daerah kabupaten/kota adalah a) penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, b) pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota, c) penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, d) pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi); 3). Penanganan kerawanan pangan (urusan daerah kabupaten/kota adalah: a) penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, b) penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota, c) pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah kabupaten/kota); (4) Keamanan pangan (urusan daerah kabupaten/kota adalah pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar).

Mengacu pada uraian tersebut, maka penganekaragaman konsumsi pangan termasuk kedalam salah satu jenis pelayanan dasar pembangunan bidang ketahanan. Oleh karena itu, perkembangan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan penduduk merupakan salah satu indikator kinerja bidang ketahanan pangan, sekaligus mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib bidang ketahanan pangan oleh pemerintah kabupaten/kota. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengatur secara lebih detail terkait dengan hal tersebut yang antara lain menjelaskan bahwa:

- 1) Pasal 25 : Penganekaragaman pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk:
 - a. memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
 - b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Pasal 26 Ayat 1: Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan melalui:
 - a. penetapan kaidah penganekaragaman pangan;
 - b. pengoptimalan pangan lokal;

- c. dan seterusnya.
- 3) Pasal 27 Ayat 1 : Penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada:
 - a. prinsip gizi seimbang;
 - b. berbasis sumber daya dan kearifan lokal;
 - c. ramah lingkungan; dan
 - d. aman.
- 4) Pasal 27 Ayat 2: Prinsip gizi seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a diukur dengan Pola Pangan Harapan dan/atau ukuran lainnya.
- 5) Pasal 27 Ayat 3: Ketentuan mengenai Pola Pangan Harapan dan/atau ukuran lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah.

B. Landasan Teoritis dan Metodologis

Neraca Bahan Makanan (NBM) adalah penyajian data dalam bentuk tabel yang dapat menggambarkan situasi dan kondisi ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk di suatu wilayah (negara/provinsi/kabupaten) dalam suatu kurun waktu tertentu. NBM menyajikan angka rata-rata jumlah pangan yang tersedia di tingkat pedagang eceran atau rumah tangga konsumen untuk konsumsi penduduk per kapita (kg/kapita/tahun atau gram/kapita/hari atau zat gizi tertentu/kapita/hari).

NBM pertama kali digunakan pada masa Perang Dunia I, NBM berkembang pesat selama Perang Dunia II untuk membantu perencanaan pangan di negara-negara sekutu. FAO mulai mendorong penyusunan NBM secara global sejak 1948, dan menerbitkan pedoman resmi pada 1949. Sejak 1957, publikasi NBM dilakukan setiap tiga tahun menggunakan data rata-rata mencakup hingga lebih dari 180 negara. NBM menjadi sumber data utama dalam berbagai Survei Pangan Dunia oleh FAO serta sebagai dasar perencanaan pembangunan pertanian global. Data NBM diperoleh dari berbagai sumber resmi maupun estimasi berbasis survei dan pendapat ahli, serta masukan dari negara-negara anggota. Sedangkan di Indonesia, NBM mulai disusun oleh BPS pada 1963 dengan bantuan FAO. Pada 1970, NBM mulai diterbitkan setiap tahun. Tahun 1975, dibentuk Tim Penyusun NBM nasional lintas instansi berdasarkan Instruksi Menteri Pertanian Nomor 12/INS/UM/6/197. Kesadaran akan kebutuhan data pangan di tingkat daerah mendorong penyusunan NBM regional sejak 1979 berdasarkan instruksi Menteri Pertanian melalui surat Nomor 92/B/1979 tanggal 18

Januari 1979 untuk melakukan penyusunan NBM regional/provinsi. Sejak 1999, penyusunan dan publikasi NBM dilanjutkan oleh Badan Bimas Ketahanan

NBM merupakan perangkat statistik untuk menyajikan informasi mengenai penyediaan/pengadaan (supply) dan penggunaan jenis pangan di suatu wilayah. Penyediaan pangan di dalam negeri/ wilayah berasal dari produksi dalam negeri dikurangi dengan perubahan stok, ditambah impor dan dikurangi dengan ekspor. Penggunaan pangan terdiri atas pemakaian untuk pakan, bibit, industri makanan dan non makanan, tercecer dan ketersediaan untuk dikonsumsi penduduk. Dalam format neraca maka penyediaan pangan dalam negeri/wilayah harus sama dengan jumlah pemakaian pangan dalam negeri/wilayah.

Tujuan penyusunan NBM adalah untuk mengetahui gambaran pengadaan (produksi, impor, stok/cadangan) dan penggunaan serta ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk maupun perubahannya di suatu wilayah pada waktu tertentu. Selain itu juga untuk memperoleh gambaran detail tentang tingkat ketersediaan, swasembada, ketergantungan pada impor, efisiensi pasca panen; kompetisi manusia – ternak (pangan versus pakan); kecenderungan produksi, ekspor, impor, stok pangan maupun kualitas/komposisi pangan yang tersedia. Dengan demikian, NBM yang disajikan secara lengkap, tepat waktu, dan berurutan dari suatu periode ke periode berikutnya akan memberikan gambaran tentang situasi penyediaan pangan per kapita suatu negara/daerah pada suatu kurun waktu tertentu. Hal tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengambil keputusan dalam menetapkan kebijakan yang harus ditempuh, memantapkan kebijakan pangan secara menyeluruh, maupun untuk menyusun perencanaan Program perbaikan pangan dan gizi.

Selama ini Indonesia mengadopsi konsep Desirable Dietary Pattern (DDP) yang diterjemahkan dengan Pola Pangan Harapan (PPH) untuk mengevaluasi dan membuat perencanaan pangan sesuai dengan karakteristik agro-ekologi dan budaya pangan setempat. FAO-RAPA (1989) mendefinisikan Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Dengan kata lain, PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi baik dalam jumlah, maupun kualitas dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.

Konsep PPH yang dikembangkan oleh FAO-RAPA mempertimbangkan keragaman pola konsumsi antar negara di wilayah Asia Pasifik. Pendekatan yang digunakan pada dasarnya merupakan konsep dari territorial diets untuk mendukung diet sehat. Pangan yang dikonsumsi secara beragam dalam jumlah cukup dan seimbang akan mampu memenuhi kebutuhan zat gizi. Keanekaragaman pangan tersebut mencakup 9 (sembilan) kelompok pangan, yaitu: (1) padi-

padian; (2) umbi-umbian; (3) pangan hewani; (4) minyak dan lemak ; (5) buah/biji berminyak; (6) kacang-kacangan; (7) gula; (8) sayur dan buah; (9) lain-lain (aneka bumbu dan ahan minuman). Mempertimbangkan variasi antar wilayah/teritori, PPH disajikan dalam angka range menurut kelompok pangan, misalnya untuk padi-padian disarankan memberikan kontribusi energi sebesar 40-60%, pangan hewani 5-20%, dan seterusnya.

Sejak konsep PPH diadopsi di awal tahun 1990-an di Indonesia, meski disadari bahwa wilayah Indonesia begitu luas dengan keragaman agro-ekologi dan budaya pangan yang sangat bervariasi, namun hanya satu komposisi PPH yang digunakan secara nasional bagi seluruh wilayah. Kontribusi atau proporsi konsumsi energi untuk masing-masing kelompok di dalam komposisi PPH nasional tersebut sesuai hasil kesepakatan Departemen Pertanian tahun 2001, yaitu: (1) Padi-padian 50%, (2) Umbi-umbian 6%, (3) Pangan hewani 12%, (4) Minyak dan lemak 10%, (5) Buah dan biji berminyak 3%, (6) Kacang- kacang 5%, (7) Gula 5%, (8) Sayur dan buah 6%, serta (9) Lain-lain (aneka bumbu dan bahan minuman) 3%.

III. DESAIN DAN METODE ANALISIS

A. Desain dan Cakupan Analisis

Desain yang digunakan dalam kajian ini adalah *descriptive quantitative dan explorative study* dengan menggali sebanyak-banyaknya data dan informasi untuk merumuskan karakteristik khas dari subjek yang dikaji secara deskriptif. Fokus utama dalam kajian ini adalah analisis situasi penyediaan dan ketersediaan pangan wilayah serta kualitas ketersediaan pangan yang tersedia untuk konsumsi penduduk di wilayah Kota Bekasi yang didasarkan pada hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi.

Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi dilaksanakan selama 3 (tiga bulan efektif) dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2025. Adapun lingkup kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan desain analisis yang dikembangkan adalah sebagai berikut: inventarisasi bahan pustakan, inventarisasi data sekunder, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan laporan.

B. Jenis dan Sumber Data

Perhitungan dan analisis ketersediaan pangan berdasarkan NBM Kota Bekasi sepenuhnya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dinas/intansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi, khususnya : Badan Pusat Statistik; Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; serta intansi-intansi terkait lainnya. Jenis data dasar yang dikumpulkan dan digunakan untuk menghitung NBM mencakup data jumlah produksi, perubahan stok, impor, dan ekspor pangan selama satu tahun. **Data**

produksi pangan mencakup berbagai komoditas pertanian, peternakan dan perikanan yang telah dihasil dari hasil kegiatan budidaya yang dilaksanakan di wilayah Kota Bekasi.

Data perubahan stok pangan adalah selisih antara stok akhir tahun dengan stok awal tahun analisis, sehingga bisa bernilai negatif (berarti terdapat pengurangan stok akibat pelepasan stok ke pasar, sehingga penyediaan pangan di pasar bertambah) atau positif (berarti terdapat penambahan stok, sehingga penyediaan pangan di pasar berkurang). Data perubahan stok, khususnya untuk komoditas beras, terigu, gula pasir, dan kacang-kacangan diperoleh dari Bulog Sub Divisi Regional Karawang-Bekasi.

Data impor pangan adalah data sejumlah bahan pangan baik yang sudah maupun belum mengalami pengolahan, yang didatangkan dari luar wilayah baik dari luar negeri maupun luar Kota ke dalam wilayah Kota Bekasi. **Data ekspor pangan** adalah data sejumlah bahan pangan baik yang sudah maupun belum mengalami pengolahan, yang dikeluarkan dari wilayah wilayah Kota Bekasi.

Tabel III.B.1. Jenis dan Sumber Data Pokok Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi

No	Jenis Data	Parameter Pokok	Tahun Data	Sumber Data	
				Publikasi	Intansi
1	Data Penyediaan Pangan	Produksi, Perubahan Stok, Impor, dan Ekspor per komoditas pangan	2024	Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2025 Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024	Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi
2	Konsumsi Pangan Penduduk	Rata-rata kuantitas konsumsi pangan penduduk per komoditas dalam satuan URT per kapita/minggu	2024	Data Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional	Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat Badan Pangan Nasional
3	Karakteristik Geografi, Demografi, Agroekologi Wilayah	Luas Wilayah, Jumlah penduduk dan Data sosial ekonomi dan kesejahteraan penduduk	2024	Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2025	Badan Pusat Statistik Kota Bekasi

Sementara itu, persyaratan data/informasi lain untuk penyusunan NBM yang harus dipenuhi meliputi persyaratan tentang jenis bahan makanan, data penduduk, besaran dan angka konversi, komposisi gizi bahan makanan, serta cara penulisan dan pembulatan angka. Berikut ini adalah uraian tentang berbagai persyaratan penyusunan NBM.

Jenis bahan makanan yang dimaksud di sini adalah jenis bahan makanan yang lazim atau umum dikonsumsi oleh masyarakat suatu negara/daerah yang data produksinya tersedia secara kontinyu dan resmi.

Data penduduk yang digunakan adalah data penduduk pertengahan tahun yang bersumber dari BPS dan Kantor Statistik. Data penduduk tersebut termasuk penduduk asing yang bermukim di Indonesia minimal selama enam bulan. Penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan diperoleh dengan cara menjumlahkan penduduk tahun yang bersangkutan dengan penduduk tahun sebelumnya, dibagi dua. Hasil Sensus Penduduk 2010 dan publikasi proyeksi penduduk Indonesia menurut kabupaten tahun 2024 oleh BPS dapat digunakan sebagai sumber data penduduk.

Besaran dan angka konversi yang digunakan adalah besaran dan angka konversi yang ditetapkan oleh Tim NBM Nasional. Untuk penyusunan NBM wilayah/daerah, sepanjang besaran dan angka konversi tersedia di daerah dapat digunakan angka tersebut dengan menyebut sumbernya. Bila belum tersedia digunakan besaran dan angka konversi nasional. Bila angka konversi yang diperlukan belum tersedia, maka angka-angka tersebut diestimasi berdasarkan kesepakatan. Faktor konversi harus memenuhi persyaratan: 1) angka-angka harus tunggal; 2) bukan angka kisaran; 3) tersedia untuk setiap jenis bahan pangan dan produksi turunannya; 4) faktor konversi yang digunakan harus dilampirkan dalam NBM yang disusun. Faktor konversi untuk penyusunan NBM mencakup produksi dan penggunaan pangan. Faktor konversi untuk menghitung produksi menyangkut semua tahapan mulai dari tahap memproduksi, proses pengolahan hingga siap untuk dibeli konsumen. Misalnya : gabah kering panen ----- gabah kering giling----- beras, yaitu untuk mengisi kolom (2) dan (3) Faktor konversi untuk penggunaan pangan menyangkut tingkat pemanfaatan bahan makanan untuk bahan baku industri, kebutuhan pakan, bibit/benih serta tercecer/rusak/waste. yaitu untuk mengisi kolom (9) sampai dengan kolom (13).

Komposisi gizi bahan makanan yang digunakan adalah yang bersumber dari buku Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM), publikasi Departemen Kesehatan, dan dari sumber lain yang resmi yaitu: "Food Composition Table for Use In East Asia" dan "Food Composition Table for International Use" Publikasi FAO. Komposisi gizi tersebut adalah besarnya nilai kandungan gizi dari bagian yang dapat dimakan. Tabel 5 merupakan komposisi kandungan gizi beberapa komoditas pangan.

C. Pengolahan dan Analisis Data

1. Cara Penyusunan NBM

Berbagai teknik perhitungan serta faktor konversi yang digunakan dalam menyusun NBM Kota Bekasi mengacu pada Buku Pedoman Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP) Departemen Pertanian (2005). Penyusunan NBM dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Analisis Neraca Bahan Makanan yang dikembangkan atas kerjasama tim Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian dan tim Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia – Institut Pertanian Bogor.

Pengisian data input NBM dilakukan secara berurut kolom demi kolom yang terdiri dari 19 kolom. Kolom-kolom tersebut adalah sebagai berikut: 1) Jenis Bahan Makanan; 2) Produksi (Masukan); 3) Produksi (Keluaran); 4) Perubahan Stok; 5) Impor; 6) Penyediaan Dalam Negeri Sebelum Ekspor; 7) Ekspor; 8) Penyediaan Dalam Negeri; 9) Pakan; 10) Bibit/Benih; 11) Diolah untuk Makanan; 12) Diolah untuk Bukan Makanan; 13) Tercecer; 14) Penggunaan lain; 15 s/d 17) Jumlah Bahan Makanan yang Tersedia untuk Konsumsi Penduduk: 15) (ton); 16) (kg/kapita/tahun); 17) (gram/kapita/hari); 18) s/d 20) Jumlah energi dan Zat Gizi yang Tersedia untuk Konsumsi Penduduk: 18) Energi (Kal/kapita/hari); 19) Protein (gram/kapita/hari); 20) Lemak (gram/kapita/hari). Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi (ton/th) diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

$$TD = O - S + M - X - (P+B+I+C+L)$$

Keterangan :

TD = ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk

O = Produksi (masukan/keluaran)

S = Perubahan stok

M = Impor

X = Ekspor

P = Pakan

B = Bibit

I = Industri (makanan dan bukan makanan)

C = Tercecer

L = Penggunaan lain

Kolom (1). Jenis Bahan Makanan

Bahan makanan yang dicantumkan dalam kolom ini adalah semua jenis bahan makanan baik nabati maupun hewani yang lazim/umum tersedia untuk dikonsumsi oleh masyarakat, dan dikelompokkan menurut jenisnya yang diikuti prosesnya dari produksi sampai dengan dapat dipasarkan/dikonsumsi dalam bentuk belum berubah atau bentuk lain yang berbeda sama sekali setelah melalui proses pengolahan. Pengelompokan bahan pangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Padi-padian**, terdiri atas : gandum, padi, jagung dan sorgum (cantel), serta produksi turunannya.
2. **Makanan berpati**, adalah bahan makanan yang mengandung pati yang berasal dari akar/umbi dan lain-lain bagian tanaman yang merupakan bahan makanan pokok lainnya. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah ubi kayu, ubi jalar, dan sagu, serta produksi turunannya. Contoh : gaplek/chips dan tapioka/pellet adalah turunan dari ubi kayu.
3. **Gula**, terdiri atas : gula pasir dan gula merah (gula mangkok, gula aren, gula semut, dan lain-lain), baik yang merupakan hasil olahan pabrik maupun rumah tangga.
4. **Buah/biji berminyak**, adalah kelompok bahan makanan yang mengandung minyak, yang berasal dari buah dan biji-bijian. Terdiri atas : kacang hijau, kelapa, kacang tanah, kacang kedele, kacang mete, kemiri, kacang bogor dan lain-lain yang sejenis. Sebagian dari komoditas ini, khususnya kelapa, diolah menjadi kopra yang selanjutnya dijadikan minyak goreng, sehingga produk turunannya tercantum dalam kelompok minyak dan lemak.
5. **Buah-buahan**, adalah sumber vitamin dan mineral dari bagian tanaman yang berupa buah. Umumnya merupakan produksi tanaman tahunan yang dapat dikonsumsi tanpa dimasak.
6. **Sayuran**, adalah sumber vitamin dan mineral yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun, bunga, buah, batang atau umbi. Tanaman tersebut pada umumnya berumur kurang dari satu tahun.
7. **Daging**, adalah bagian-bagian dari hewan yang disembelih atau dibunuh dan lazim dimakan manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain selain pendinginan.
8. **Telur**, adalah telur ayam buras, telur ayam ras, dan telur itik.
9. **Susu**, adalah cairan yang diperoleh dari ambing ternak perah sehat, dengan cara pemerahan yang benar, terus-menerus dan tidak dikurangi sesuatu dan/atau ditambahkan ke dalamnya sesuatu bahan lain.
10. **Ikan**, adalah komoditas yang berupa binatang air dan biota perairan lainnya. Yang dimaksud komoditas ikan disini adalah yang berasal dari kegiatan penangkapan di laut maupun di perairan umum (waduk, sungai dan rawa) dan hasil dari kegiatan budidaya (tambak, kolam, keramba dan sawah) yang dapat diolah menjadi bahan makanan yang lazim/umum dikonsumsi masyarakat.
11. **Minyak dan Lemak**, adalah bahan makanan yang berasal dari nabati, seperti: minyak kelapa, minyak sawit, minyak kacang tanah, minyak kedele, dan minyak jagung, serta yang berasal dari hewani yaitu minyak ikan. Sedangkan lemak umumnya berasal dari hewani, seperti: lemak sapi, lemak kerbau, lemak kambing/domba, lemak babi, dan lain-lain.

Kolom (2) dan (3). Produksi

Produksi adalah jumlah keseluruhan hasil masing-masing bahan makanan yang dihasilkan dari sektor pertanian (Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, dan Perkebunan), yang belum mengalami proses pengolahan maupun yang sudah mengalami proses pengolahan. Produksi dikategorikan menjadi 2 kategori sebagai berikut :

1. **Kolom (2) : Masukan (Input)** Masukan adalah produksi yang masih dalam bentuk asli maupun dalam bentuk hasil olahan yang akan mengalami proses pengolahan lebih lanjut. Sebagai contoh, pada komoditas ternak masukan (input) berupa karkas.
2. **Kolom (3) : Keluaran (Output)** adalah produksi dari hasil keseluruhan atau sebagai hasil turunan yang diperoleh dari kegiatan berproduksi; atau hasil utama yang langsung diperoleh dari kegiatan berproduksi yang belum mengalami perubahan. Besarnya output sebagai hasil dari input sangat tergantung pada besarnya derajat ekstraksi dan faktor konversi (Tabel 3, 4, 5). Sebagai contoh, pada komoditas ternak keluaran (ouput) berupa daging.

Pada kelompok buah/biji berminyak, kacang tanah lepas kulit/biji kacang tanah dan kelapa daging masing-masing mempunyai produksi turunan dalam bentuk minyak goreng, yang termasuk dalam kelompok minyak dan lemak. Pada kelompok daging, produksi turunan karkas adalah antara lain dalam bentuk lemak. Dalam perhitungan, lemak ini harus dimasukkan dalam kelompok minyak dan lemak.

Kolom (4). Stok dan Perubahan Stok

Stok adalah sejumlah bahan makanan yang disimpan/dikuasai oleh Pemerintah atau Swasta yang dimaksudkan sebagai cadangan dan akan digunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan. Data stok yang digunakan adalah data stok awal dan akhir tahun.

Perubahan Stok adalah selisih antara stok akhir tahun dengan stok awal tahun. Perubahan stok ini hasilnya bias negatifive (-) dan bisa positif (+). Negatif (-) berarti ada penurunan stok akibat pelepasan stok ke pasar sehingga komoditas yang beredar di pasar bertambah. Positif (+) berarti ada peningkatan stok yang berasal dari komoditas yang beredar di pasar sehingga komoditas yang beredar di pasar menjadi menurun.

Kolom (5). Impor

Impor adalah sejumlah bahan makanan baik yang belum maupun yang sudah mengalami pengolahan, yang didatangkan/dimasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah RI, dengan tujuan untuk diperdagangkan, diedarkan, atau disimpan. Untuk penghitungan NBM Regional/Provinsi, yang termasuk impor adalah :

- a. Bahan makanan yang didatangkan/dimasukkan dari luar wilayah RI langsung ke dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang dalam hal ini perlu memperhatikan kode harmonyzed system.
- b. Bahan makanan yang didatangkan/dimasukkan dari wilayah daerah administrative lain ke dalam wilayah daerah administrative yang bersangkutan dalam arti lain perdagangan antar pulau atau antar provinsi.

Estimasi jumlah impor pangan diperoleh dari selisih antara data konsumsi pangan dengan data produksi pangan di wilayah Kota Bekasi. Data konsumsi per jenis pangan didasarkan pada rata-rata konsumsi pangan penduduk per kapita/hari sesuai dengan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kota Bekasi tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Data total konsumsi pangan wilayah dalam setahun diperoleh dari hasil perkalian antara rata-rata konsumsi pangan dengan jumlah hari dalam setahun dan jumlah penduduk di Kota Bekasi pada tahun 2024. Jika selisih antara pangan yang dikonsumsi dan diproduksi bernilai positif maka pangan tersebut berasal dari impor dari wilayah lain. Namun jika selisihnya bernilai negatif maka ini menunjukkan bahwa nilai produksi lebih besar dibandingkan dengan konsumsi. Hal ini tidak dapat diestimasi sebagai ekspor, karena terdapat kemungkinan pangan masih beredar dalam pasar dalam wilayah Kota Bekasi. Jika tidak tersedia data produksi pangan, maka jumlah konsumsi pangan tersebut merupakan satu-satunya sumber pengadaan pangan yang berasal dari impor. Estimasi jumlah impor untuk beberapa pangan strategis dihitung berdasarkan pendekatan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan data rata-rata konsumsi pangan (Gram/kapita/hari) yang diperoleh dari hasil Susenas dikalikan dengan 110% (merupakan perbedaan angka kecukupan energi di tingkat konsumsi dan ketersediaan pangan) dapat diperoleh estimasi jumlah rata-rata kebutuhan pangan untuk konsumsi oleh penduduk di wilayah Kota Bekasi.
- b. Selanjutnya dihitung total jumlah ketersediaan pangan wilayah (ton/tahu) dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Kebutuhan pangan (Gram/kapita/hari)} \times \text{Jumlah Penduduk} \times 365}{1.000.000}$$

- c. Angka hasil perhitungan tersebut selanjutnya dijadikan sebagai data estimasi jumlah impor pangan di kolom 5 pada Neraca Bahan Makanan setelah ditambah dengan sejumlah pangan berdasarkan proporsi penggunaan pangan untuk pakan, bibit/benih, diolah untuk industri makanan dan bukan makanan, serta tercecer.

Kolom (6). Penyediaan Dalam Negeri Sebelum Ekspor

Penyediaan dalam negeri sebelum ekspor adalah sejumlah bahan makanan yang berasal dari produksi (keluaran) dikurangi perubahan stok ditambah impor.

Kolom (7). Ekspor

Untuk penghitungan NBM Regional/Provinsi yang termasuk ekspor adalah :

- a. Bahan makanan yang dikeluarkan dari suatu wilayah daerah administratif, langsung ke luar wilayah negara RI yang dalam hal ini perlu memperhatikan kode harmony system (HS).
- b. Bahan makanan yang dikeluarkan dari suatu wilayah daerah administratif lain yang berarti perdagangan antar pulau atau antar provinsi.

Kolom (8). Penyediaan Dalam Negeri

Penyediaan dalam negeri adalah sejumlah bahan makanan yang berasal dari produksi (keluaran) dikurangi perubahan stok ditambah impor dikurangi ekspor.

Kolom (9 - 13). Pemakaian Dalam Negeri

Pemakaian dalam negeri adalah sejumlah bahan makanan yang digunakan di dalam daerah untuk pakan, bibit/benih, diolah untuk industri makanan dan bukan makanan, yang tercecer, dan yang tersedia untuk dimakan. Untuk menghitung jumlah pemakaian pangan di dalam negeri digunakan angka konversi dengan mengacu pada angka konversi nasional berdasarkan panduan penyusunan NBM yang disesuaikan dengan kondisi potensi wilayah Kota Bekasi.

- a. **Kolom (9) : Pakan** adalah sejumlah bahan makanan yang langsung diberikan kepada ternak peliharaan baik ternak besar, ternak kecil, unggas, maupun ikan.
- b. **Kolom (10) : Bibit/Benih** adalah sejumlah bahan makanan yang digunakan untuk keperluan reproduksi.
- c. **Kolom (11) : Diolah untuk Makanan** adalah sejumlah bahan makanan yang masih mengalami proses pengolahan lebih lanjut melalui industri makanan dan hasilnya dimanfaatkan untuk makanan manusia dalam bentuk lain.
- d. **Kolom (12) : Diolah untuk Bukan Makanan** adalah sejumlah bahan makanan yang masih mengalami proses pengolahan lebih lanjut dan dimanfaatkan untuk kebutuhan industri bukan untuk makanan manusia, termasuk untuk industri pakan ternak/ikan.
- e. **Kolom (13) : Tercecer** adalah sejumlah bahan makanan yang hilang atau rusak, sehingga tidak dapat dimakan oleh manusia, yang terjadi secara tidak disengaja sejak bahan makanan tersebut diproduksi hingga tersedia untuk konsumen.
- f. **Kolom (14) : Penggunaan Lain** adalah bahan makanan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan untuk turis, pengungsi, dan lain-lain yang besaran sulit diketahui karena datanya tidak tersedia.

- g. Kolom (15) : Bahan Makanan** adalah sejumlah jenis bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk suatu Negara atau daerah, dalam suatu kurun waktu tertentu.

Kolom (16 - 20). Ketersediaan Per Kapita

Ketersediaan per kapita adalah sejumlah bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi setiap penduduk suatu negara/daerah dalam suatu kurun waktu tertentu, baik dalam bentuk natural (Kolom 16 : kg/kapita/tahun; kolom 17 : Gram/kapita/hari) maupun bentuk unsur gizinya. Untuk menghitung ketersediaan energi dan zat gizi (protein dan lemak) setiap orang setiap hari digunakan Daftar Komposisi Bahan Makanan. Unsur gizi utama tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Kolom (18) : Energi** adalah sejumlah kalori hasil pembakaran karbohidrat yang berasal dari berbagai jenis bahan makanan. Energi ini sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk kegiatan tubuh seluruhnya.
- b. **Kolom (19) : Protein** adalah suatu persenyawaan yang mengandung unsur “N”, yang sangat dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan serta penggantian jaringan-jaringan yang rusak/aus.
- c. **Kolom (20) : Lemak** adalah salah satu unsur zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai tempat penyimpanan energi, protein, dan vitamin.

2. Analisis Kemandirian Pangan

Salah satu ukuran tingkat kemandirian pangan wilayah adalah dengan menelaah tingkat swasembada pangan yang diukur berdasarkan seberapa besar penyediaan pangan dalam suatu wilayah dapat dipenuhi dari hasil produksi di wilayah sendiri. Disisi lain dapat pula dikaji dari sudut Tingkat ketergantungan yang diukur berdasarkan besarnya penyediaan pangan dalam suatu wilayah yang harus dipenuhi melalui impor pangan dari luar daerah. Secara sederhana tingkat ketergantungan wilayah diukur berdasarkan tingkat atau perbandingan yang dinyatakan dalam persen antara jumlah impor dengan total penyediaan pangan dalam wilayah yang merupakan hasil perhitungan jumlah produksi ditambah perubahan stok dan impor dikurangi ekspor. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan jumlah impor pangan akan melebihi jumlah penyediaan dalam wilayah dengan kata lain Tingkat ketergantungan terhadap impor lebih dari 100 persen.

3. Analisis Ketersediaan Pangan

Situasi ketersediaan pangan di Kota Bekasi dapat dianalisis dari berbagai segi yaitu (1) Aspek kuantitas pangan dan (2) Aspek kualitas pangan. Analisis aspek kuantitas ketersediaan pangan dilihat dari besarnya jumlah pangan yang tersedia di Kota Bekasi dan dinyatakan dalam satuan volume (ribu ton), kg/kapita/tahun atau gram/kapita/hari. Sedangkan analisis ketersediaan pangan secara kualitatif dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu aspek gizi

dan keragaman. Aspek gizi dapat dilihat dari besarnya energi dan angka kecukupan gizi, sedangkan aspek keragaman dapat dilihat dari pola ketersediaan pangan (kontribusi energi menurut kelompok komoditas pangan), dan skor mutu pangan dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH).

Tabel III.C.1. Susunan Pola Pangan Harapan (PPH) Nasional Untuk Tingkat Ketersediaan

No	Kelompok Pangan	Berat (gram/kapita/hr)	Energi (Kkal/kapita/hr)	% AKE	Bobot	Skor PPH
1	Padi-padian	330	1.200	50,0	0,5	25,0
2	Umbi-umbian	108	144	6,0	0,5	2,5
3	Pangan Hewani	168	288	12,0	2,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	30	240	10,0	0,5	5,0
5	Buah/biji berminyak	12	72	3,0	0,5	1,0
6	Kacang-kacangan	42	120	5,0	2,0	10,0
7	Gula	36	120	5,0	0,5	2,5
8	Sayur dan Buah	276	144	6,0	5,0	30,0
9	Lainnya	18	72	3,0	0,0	0,0
	Jumlah		2.400	100,0		100,0

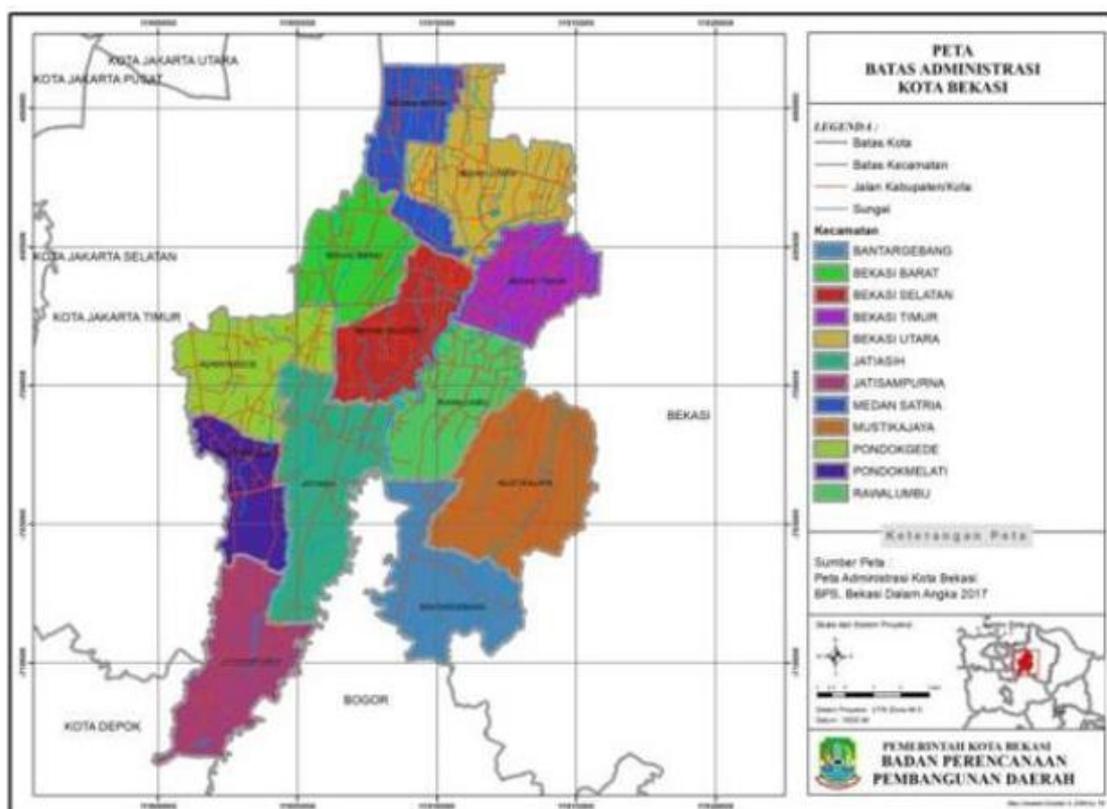
Keterangan : Berdasarkan Standar PPH Ideal Nasional dan AKE 2.400 kkal/kapita/hari

Penyempurnaan standar Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ideal untuk tingkat ketersediaan di Indonesia saat ini mengacu pada rumusan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian tahun 2015 sebagaimana disajikan pada Tabel III.C.1. Beberapa pertimbangan pokok yang digunakan dalam analisis, antara lain: (1) Angka Kecukupan Gizi (AKG) berdasarkan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNKPG) Tahun 1998 sebesar 2200 kkal/kapita/hari atau WNKPG Tahun 2012 sebesar 2400 kkal/kapita/hari; (2) Perubahan standar AKG dilakukan diawal periode RPJM; (3) Persentase energi untuk perhitungan skor PPH dihitung terhadap AKG; (4) Bobot disempurnakan sesuai teori rating; (5) Skor maksimum PPH adalah 100; (6) Peran pangan hewani, gula, serta sayur dan buah disesuaikan dengan PUGS; (7) Peran umbi-umbian ditingkatkan sejalan dengan kebijakan diversifikasi pangan pokok dan pengembangan pangan lokal; (8) Peran makanan lainnya terutama bumbu dan minuman lainnya tidak diabaikan; (9) Untuk Beberapa daerah yang memiliki karakteristik dan potensi wilayah serta preferensi pangan masyarakat yang dianggap spesifik diperlukan penyesuaian.

IV. KEADAAN UMUM WILAYAH

A. Kondisi Geografis

Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang menjadi bagian dari Megapolitan Jabodetabek. Bahkan Kota Bekasi juga menjadi kota satelit dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia. Kota Bekasi menjadi salah satu kota yang memiliki perkembangan yang sangat pesat. Daerah yang dulunya hanya berupa sawah, saat ini telah disulap menjadi kota dengan berbagai infrastruktur yang sangat memadai. Kota Bekasi sudah dilintasi berbagai transportasi publik seperti kereta Commuter Line, Light Rail Transit (LRT) serta berbagai transportasi umum lainnya. Selain itu, keberadaan jalan tol juga makin menunjang mobilitas masyarakat.



Sumber : RKPD Kota Bekasi Tahun 2026.

Gambar IV.A.1. Peta Wilayah Administratif Kota Bekasi

Secara geografis Kota Bekasi merupakan daerah perbatasan di Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi DKI Jakarta yang berada pada $106^{\circ}48'28''$ - $107^{\circ}27'29''$ Bujur Timur dan $6^{\circ}10'6''$ - $6^{\circ}30'6''$ Lintang Selatan. Secara fisik geografis, ketinggian wilayah di Kota Bekasi menunjukkan variasi yang cukup signifikan, berkisar antara 28 hingga 110 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kota Bekasi dialiri 3 sungai utama yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter, beserta anak-anak sungainya. Sungai Bekasi mempunyai hulu di Sungai Cikeas yang berasal dari gunung pada ketinggian kurang lebih 1.500 meter dari permukaan air. Limpasan air permukaan di setiap kecamatan di Kota Bekasi rata rata sekitar 33,92 juta m^3 /tahun.

Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 213,12 km² atau 21.304 ha, dengan batas administrasi sebagai berikut: sebelah Utara (Kabupaten Bekasi), sebelah Selatan (Kabupaten Bogor), sebelah Barat (Provinsi Daerah Khusus Jakarta), dan sebelah Timur (Kabupaten Bekasi). Kota Bekasi terdiri atas 12 kecamatan dan 56 kelurahan, wilayah kecamatan, ibu kota kecamatan dan luas daratan masing masing kecamatan di wilayah Kota Bekasi disajikan pada Tabel IV.A.1.

Tabel IV.A.1. Data Umum Luas Wilayah Per Kecamatan di Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Ibukota Kecamatan <i>Capital of Subdistrict</i>	Luas <i>Total Area</i> (km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Pondokgede	Jatiwaringin	17,43
Jatisampurna	Jatisampurna	20,19
Pondok Melati	Jatirahayu	11,02
Jatiasih	Jatiasih	24,26
Bantargebang	Bantargebang	19,24
Mustikajaya	Mustikajaya	24,76
Bekasi Timur	Bekasijaya	14,64
Rawalumbu	Bojong Rawalumbu	16,85
Bekasi Selatan	Pekayonjaya	15,81
Bekasi Barat	Bintara	14,9
Medansatria	Medansatria	13,21
Bekasi Utara	Perwira	20,81
Kota Bekasi		213,12

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka 2025 (BPS Kota Bekasi, 2025)

Penggunaan lahan Kota Bekasi didominasi oleh permukiman teratur dan permukiman tidak teratur yang dibangun secara swadaya. Permukiman teratur yang dikembangkan developer banyak dikembangkan di Kota Bekasi dengan tingkat kepadatan cukup tinggi yang memanfaatkan potensi aksesibilitas jalan arteri dan kolektor primer yang strategis untuk menampung limbah penduduk yang bekerja di Jakarta dan di kota-kota sekitar Kota Bekasi. Penggunaan lahan terbangun lainnya diperuntukkan untuk kawasan komersial, industri, fasilitas pelayanan umum, kawasan campuran, pemerintahan, perkantoran dan infrastruktur pendukung kegiatan perkotaan.

Dalam konteks nasional, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kota Bekasi merupakan bagian Kawasan Strategis Nasional yaitu

Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur termasuk Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat). Kota Bekasi juga merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yang dalam peraturan tersebut dijelaskan sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan berskala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Dan Cianjur, kedudukan Kota Bekasi dalam konteks Jabodetabekpunjur, Kawasan Perkotaan Bekasi memiliki fungsi utama sebagai: a) pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan; b) pusat perdagangan dan jasa skala regional; c) pusat pelayanan kesehatan; d) pusat pelayanan pendidikan tinggi; e) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; dan f) pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara.

Dalam konteks Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 – 2042, Kota Bekasi diarahkan sebagai PKN yang memiliki peran sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi yaitu Kawasan Perkotaan Bodebek. Selain itu, Kota Bekasi juga diarahkan untuk menjadi simpul pelayanan dan jasa perkotaan, serta mengembangkan sektor perdagangan, jasa dan industri padat tenaga kerja. Adapun berdasarkan Perda Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang RTRW Kota Bekasi Tahun 2024-2044, Kota Bekasi diarahkan sebagai tempat hunian dan usaha kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

B. Kondisi Agroekologi

Kondisi topografi Kota Bekasi relatif datar dan landai, dengan kemiringan lerengnya antara 0 – 2%. Wilayah Kota Bekasi terletak pada ketinggian antara 11 m sampai 81 m di atas permukaan air laut (dpl). Kecamatan Bekasi Utara dan Bekasi Timur merupakan wilayah yang paling rendah berada pada 0 – 5 m dpl, sehingga wilayahnya banyak genangan, terutama pada musim hujan. Ketinggian kurang dari 30 m dpl berada pada Kecamatan Bekasi Selatan (sebagian), Pondok Gede, Jatiasih (sebagian), Medan Satria, dan Mustika Jaya. Sedangkan ketinggian di atas 30 dpl berada di Pondok Melati, Jatiasih (sebagian), dan Mustika Jaya (sebagian). Kecamatan Jatisampurna dan Bantar Gebang merupakan wilayah yang memiliki ketinggian di atas 45 m dpl.

Kota Bekasi memiliki iklim kering dengan tingkat kelembaban rendah dan rata-rata suhu udara tiap tahun sekitar 26,2°C. Pola curah hujan di Kota Bekasi adalah musonial dimana hanya terdapat satu puncak terjadinya musim hujan. Berdasarkan data Perum Jasa Tirta II tahun 2016 menunjukkan bahwa intensitas curah hujan sebanyak 1.792 mm, dengan jumlah hari hujan 147 hari. Jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Februari, yaitu sebanyak 112 hari dengan intensitas curah hujan total 332 mm. Data yang sama juga memperlihatkan

kondisi iklim yang tidak menentu yaitu terjadinya hujan hampir sepanjang tahun. Daya dukung air merupakan kemampuan sumber daya air untuk memenuhi suatu kebutuhan dengan meninjau besarnya ketersediaan air. Hasil analisis potensi ketersediaan air di Kota Bekasi dengan menggunakan data ketersediaan berdasarkan data SK.147/2023, luasan tata guna lahan eksisting dan luasan guna lahan pola ruang RDTR Kota Bekasi, ketersediaan air tahun 2022 sebesar 130.844.849,84 m³/tahun.

Dengan kebutuhan air Kota Bekasi sebesar 301.284.051,97 m³/tahun, maka terdapat selisih yang cukup besar yaitu mencapai 170.456.164,16 m³/tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa daya dukung air/ketersediaan air pada tahun 2022 secara keseluruhan sudah melampaui ambang batas. Jika dilihat dari luasannya, luas wilayah yang belum melampaui ambang batas yaitu sebesar 1.560,61 ha sedangkan luas wilayah yang sudah melampaui sebesar 19.742,98 ha.

Kota Bekasi sebagai wilayah perkotaan yang letaknya berbatasan langsung dengan ibu-kota negara memang bukanlah wilayah yang dapat memproduksi hasil pertanian dalam jumlah yang cukup untuk penduduknya. Namun bukan berarti sektor pertanian tidak dikembangkan di Kota Bekasi. Pertanian di Kota Bekasi dikembangkan dalam konsep pertanian perkotaan, dimana kegiatan pertanian diusahakan di setiap lahan yang bisa dimanfaatkan serta mencegah alih fungsi lahan pertanian.

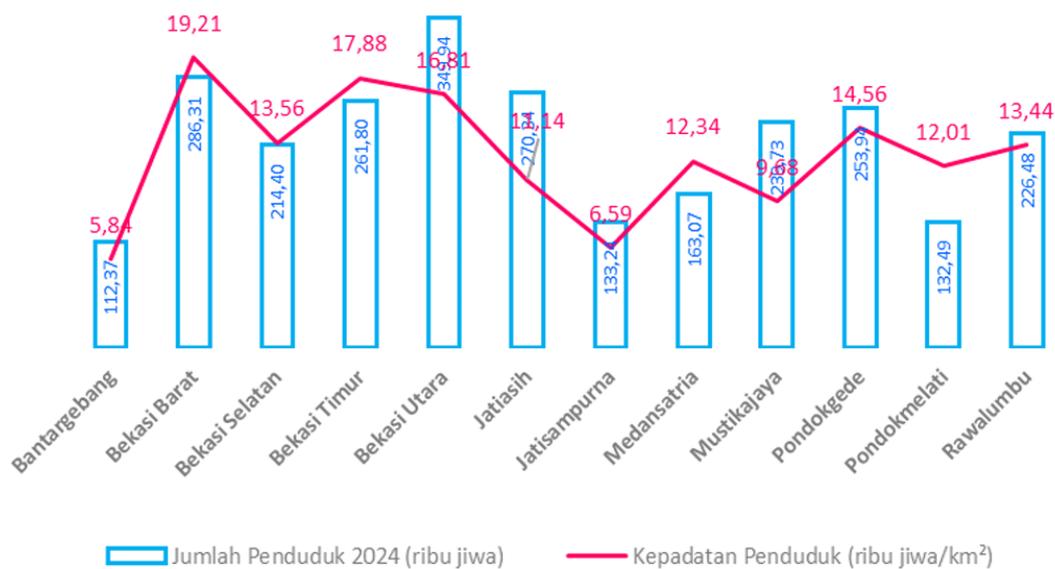
Wilayah Kota Bekasi dialiri 3 (tiga) sungai utama, yaitu: Sungai Cakung, Sungai Bekasi, dan Sungai Sunter, beserta anak-anak sungainya. Sungai Bekasi mempunyai hulu di Sungai Cikeas yang berasal dari gunung dengan ketinggian kurang lebih 1.500 meter dari permukaan air laut. Air permukaan yang terdapat di wilayah Kota Bekasi meliputi sungai/kali Bekasi dan beberapa sungai/kali kecil serta saluran irigasi Tarum Barat yang selain digunakan untuk mengairi sawah juga merupakan sumber air baku bagi kebutuhan air minum wilayah Bekasi (kota dan kabupaten) dan wilayah DKI Jakarta. Kondisi air permukaan sungai-sungai yang melintasi Kota Bekasi berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Metropolitan Bodebekkapur (2016) saat ini kondisi tercemar sedang hingga berat. Kemungkinan besar pencemaran ini disebabkan oleh limbah rumah tangga dan limbah industri yang berada di sekitar aliran sungai. Kondisi air tanah di wilayah Kota Bekasi sebagian cukup potensial untuk digunakan sebagai sumber air bersih terutama di wilayah selatan Kota Bekasi, tetapi untuk daerah yang berada di sekitar TPA Bantar Gebang kondisi air tanahnya kemungkinan besar sudah tercemar. Kondisi air tanah yang terdapat di Bekasi Timur sebagian mengandung zat besi.

Struktur geologi wilayah Kota Bekasi didominasi oleh pleistocene volcanik facies. Struktur aluvium menempati sebagian kecil wilayah Kota Bekasi bagian utara sedangkan struktur miocene sedimentary facies terdapat di bagian timur wilayah Kota Bekasi sepanjang

perbatasan dengan DKI Jakarta. Kedalaman efektif tanah sebagian besar di atas 91 cm. Jenis tanah latosol dan aluvial, serta tekstur tanah didominasi tekstur sedang dan halus. Komposisi perbandingan berdasarkan luasnya adalah: tekstur halus seluas 17.260 ha (82%), tekstur sedang seluas 3.368 ha (16%) dan tekstur kasar seluas 421 ha (2%). Perubahan luas antara lahan bervegetasi dengan lahan terbangun menunjukkan hasil yang berbanding terbalik. Hal ini dibuktikan dengan berkurangnya lahan bervegetasi dan bertambahnya lahan terbangun selama 15 tahun. Luas lahan vegetasi berkurang sebesar 4.805 ha dan lahan terbuka yang berkurang sebesar 752 ha. Sementara lahan terbangun menjadi bertambah sebesar 5.596 ha.

C. Situasi Demografi

Pada tahun 2024 penduduk Kota Bekasi berdasarkan hasil proyeksi dari SP2020 diperkirakan sebanyak 2,63 juta jiwa. Terdiri atas laki-laki 1,32 juta jiwa dan perempuan 1,31 juta jiwa, sehingga angka sex ratio di Kota Bekasi sebesar 101,08 yang artinya terdapat 101 sampai 102 penduduk laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan. Populasi penduduk terbesar berada di Kecamatan Bekasi Utara yang dihuni sebanyak 347,84 ribu penduduk (13,24 persen), diikuti Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Jatiasih, masing masing 286,11 ribu penduduk (10,89 persen) dan 265,30 ribu penduduk (10,10 persen). Sedangkan Kecamatan dengan populasi terkecil adalah Kecamatan Bantargebang yang memiliki jumlah penduduk 111,44 ribu penduduk (4,24 persen). Dari 12 Kecamatan, 9 diantaranya memiliki tingkat kepadatan penduduk lebih dari 10.000 jiwa/km². Kecamatan Bekasi Barat menjadi daerah terpadat dengan tingkat kepadatan mencapai 19 ribu jiwa/km².



Gambar IV.C.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024

Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun dan lebih. Mereka terdiri dari “Angkatan Kerja” dan “Bukan Angkatan Kerja”. Proporsi penduduk yang tergolong “Angkatan Kerja” adalah mereka yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja yakni yang bekerja atau mencari pekerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja. Penduduk Kota Bekasi berusia 15 tahun atau lebih pada tahun 2024 mencapai 2,04 juta orang. Jumlah angkatan kerja sebanyak 1,32 juta orang, dimana 1,21 juta orang diantaranya bekerja di berbagai sektor usaha, sedangkan sisanya 0,104 juta masih menganggur.

Komposisi penduduk yang bekerja di Kota Bekasi didominasi oleh lulusan SMA, yakni mencapai 42,91 persen, dan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja yang tamat SMA sebesar 66,60 persen. Sedangkan untuk penduduk bekerja lulusan perguruan tinggi mencapai 36,81 persen dan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja yang tamat perguruan tinggi sebesar 72,40 persen. Jadi terlihat bahwa perbedaan persentase yang bekerja dengan angkatan kerja antara yang lulus SMA dan perguruan tinggi menjadi cukup signifikan.

D. Situasi Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bekasi selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, Kota Bekasi menghadapi tantangan ekonomi yang serius dengan pertumbuhan ekonomi yang negatif, yakni sebesar -2,58 persen. Hal ini sangat dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang melanda global dan mengganggu aktivitas ekonomi secara luas termasuk Kota Bekasi. Setelah berkontraksi cukup dalam, LPE Kota Bekasi di tahun-tahun berikutnya selalu menunjukkan peningkatan bahkan pada tahun 2024 mencatat pertumbuhan sebesar 5,19 persen. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni dengan capaian sebesar 5,43 persen, namun pada tahun 2024, capaian ini juga melebihi LPE Kota Bogor (5,15 persen) serta Provinsi Jawa Barat (4,95 persen) dan Nasional (5,03 persen). Namun jika dibandingkan dengan kota lain di sekitar Jakarta, LPE Kota Bekasi telah berhasil melampaui LPE Kota Tangerang (5,04 persen) dan Kota Tangerang Selatan (5,02 persen).

Upaya pengentasan kemiskinan di Kota Bekasi berkorelasi positif dengan kinerja LPE yang dicapai. Maksudnya yaitu, jika LPE Kota Bekasi menunjukkan peningkatan maka angka kemiskinan mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya. Hal ini mengindikasikan bahwa salah satu upaya menurunkan angka kemiskinan yaitu dengan meningkatkan LPE melalui peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan dan potensial. Pada tahun 2020, angka kemiskinan Kota Bekasi mengalami lonjakan yang signifikan yaitu mencapai 8,58 persen. Penyebab utama lonjakan ini terkait dengan dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu

banyak sektor ekonomi dan menyebabkan hilangnya pekerjaan serta pendapatan masyarakat. Pada tahun-tahun berikutnya, upaya-upaya untuk menurunkan angka kemiskinan terus dilakukan.

Upaya pengurangan ketimpangan pendapatan di Kota Bekasi menunjukkan tren yang menarik. Hal ini terlihat dari nilai Indeks Gini Kota Bekasi selama periode 2020 hingga 2024 yang fluktuatif. Indeks Gini di Kota Bekasi cenderung mengalami kenaikan yang signifikan hingga tahun 2022 dan melebihi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan struktur ekonomi, ketidakseimbangan dalam distribusi lapangan kerja, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi pendapatan masyarakat. Pada tahun 2023, terlihat adanya penurunan sedikit dalam realisasi Indeks Gini menjadi 0,414, berada di atas target yang ditetapkan, dan kemudian meningkat kembali di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi perlu melakukan upaya yang lebih besar untuk mengurangi ketimpangan yang ada.

Upaya pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Bekasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pada akhirnya menunjukkan kinerja yang positif di tahun 2024. Realisasi pada tahun 2024 terus melampaui target yang ditetapkan semenjak tahun 2023 dan TPT Kota Bekasi berada pada angka terendah yaitu 7,82 persen. Penurunan TPT Kota Bekasi masih relatif lebih tinggi diantara kota-kota di sekitar Jakarta—meskipun lebih rendah dari TPT Kota Bogor—namun penurunan angka TPT masih tergolong stagnan dibandingkan dengan kota-kota lainnya.

Laju inflasi Kota Bekasi dari tahun 2020 hingga 2024 memberikan gambaran tentang stabilitas ekonomi dan kinerja kebijakan moneter. Target pengendalian laju inflasi ditetapkan setiap tahun untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Tingkat inflasi tertinggi di Kota Bekasi terjadi pada tahun 2022, di mana laju inflasi Kota Bekasi melonjak menjadi 5,37 persen melebihi rata-rata kota di sekitar Jakarta. Ini terjadi karena dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kenaikan harga energi atau tekanan inflasi dari sektor-sektor tertentu dalam ekonomi.

Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk regional bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain : (1) Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi; (2) Untuk mengetahui tingkat struktur perekonomian; (3) Untuk mengetahui besarnya PDRB per Kapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan; (4) Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi berdasarkan pertumbuhan harga produsen.

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan PDRB maka semakin cepat proses penambahan output wilayah sehingga prospek perkembangannya semakin baik. Dengan diketahuinya sumber-sumber pertumbuhan PDRB maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan.

Jika dicermati kontribusi PDRB ADHB terhadap Provinsi Jawa Barat tahun 2024 terlihat bahwa kontribusi Kota Bekasi berada di peringkat ke-6, jauh di bawah Kabupaten Bekasi (14,89 persen), Kota Bandung (13,00 persen), Kabupaten Bogor (10,92 persen), dan Kabupaten Karawang (10,85 persen). Namun masih relatif tidak jauh dari Kabupaten Bandung (5,92 persen). Kondisi ini mencerminkan bahwa Kota Bekasi masih penting dalam mendukung perekonomian Provinsi Jawa Barat. Dalam konteks kota di sekitar Jakarta yang berada di Provinsi Jawa Barat, PDRB Kota Bekasi baik ADHB dan ADHK berada di urutan ke-2 tertinggi setelah Kota Tangerang. Hal ini menunjukkan kompetitifnya perekonomian Kota Bekasi. Dari 5 kota di sekitar Jakarta, terdapat satu kesamaan sektor yang berkontribusi di masing masing kota yaitu sektor perdagangan besar dan eceran. Sementara 3 sektor dominan di Kota Bekasi sangat identik dengan Kota Bogor dan Kota Tangerang.

Sektor yang berkontribusi besar di Kota Bekasi itu yaitu industri pengolahan (33,05 persen), perdagangan besar dan eceran (20,70 persen), dan transportasi dan pergudangan (13,00 persen). Terdapat satu sektor yang kontribusinya tidak jauh berbeda dan berada di peringkat ke-4, yaitu konstruksi (10,84 persen). Sementara sektor lainnya kontribusinya di bawah 5 persen. Selain 4 sektor unggulan di Kota Bekasi seperti yang dijelaskan di atas, terdapat sektor yang memiliki laju pertumbuhan tinggi dan potensial untuk dikembangkan sebagai penopang perekonomian ke depannya. Sektor itu yaitu, jasa lainnya (8,17 persen), pengadaan air; pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang (6,97 persen), informasi dan komunikasi (6,81 persen), penyediaan akomodasi makan dan minum (6,63 persen), dan jasa pendidikan (6,26 persen).

Salah satu indikator produktivitas ekonomi penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

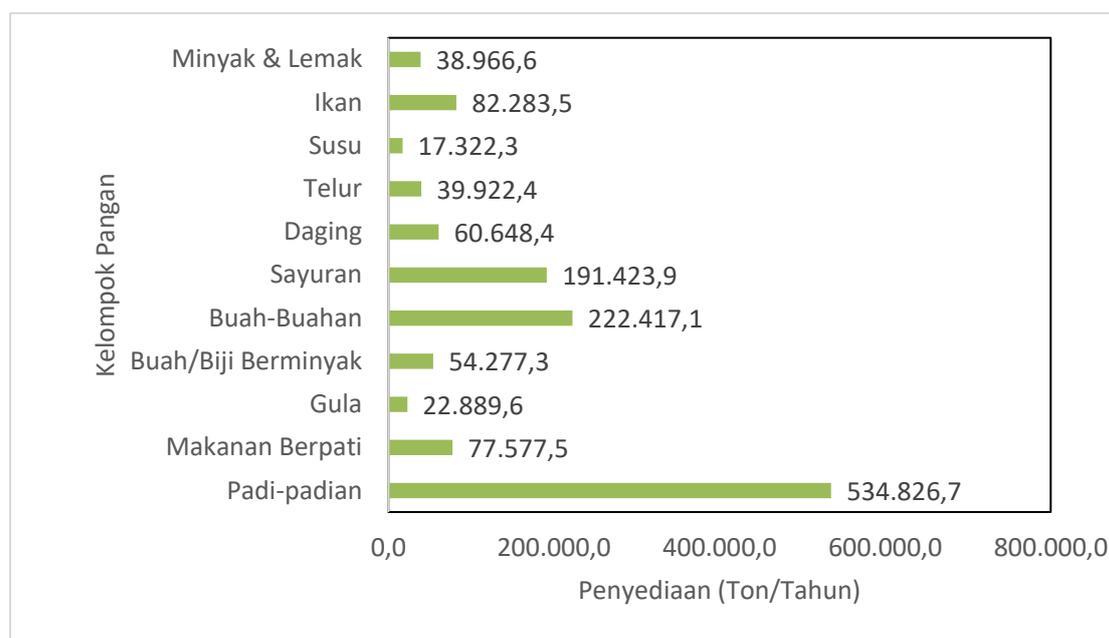
PDRB Per Kapita Kota Bekasi cenderung menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Dalam konteks kota di sekitar Jakarta, PDRB Per Kapita Kota Bekasi hanya di atas Kota Depok meskipun PDRBnya tertinggi ke-2. Hal ini disebabkan jumlah penduduk Kota Bekasi merupakan yang terbanyak mencapai 2,6 juta jiwa di tahun 2024. Tantangan dalam upaya meningkatkan PDRB Per Kapita Kota Bekasi ini yaitu mengoptimalkan sektor-sektor potensial dan menjaga laju pertumbuhan penduduk.

Pengeluaran per kapita merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat konsumsi dan kemampuan belanja masyarakat di suatu wilayah. Pengeluaran per kapita ini juga dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Membaiknya kondisi ekonomi tersebut tentunya dipengaruhi berbagai faktor yang menyebabkan wilayah tersebut makin kompetitif dan produktif. Pengeluaran per kapita Kota Bekasi dalam kurun 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif dan sangat dipengaruhi berbagai faktor. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita Kota Bekasi mengalami penurunan, namun ditahun-tahun berikutnya menunjukkan tren meningkat. Meskipun pengeluaran per kapita Kota Bekasi tertinggi diantara kota-kota di sekitar Jakarta, upaya untuk meningkatkan kinerja itu tetap diperlukan. Penciptaan lapangan kerja baru dengan meningkatkan investasi akan mendorong penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan konsumsi masyarakat.

V. SITUASI PENYEDIAAN PANGAN

A. Situasi Penyediaan Per Kelompok Pangan

Penyediaan pangan di wilayah Kota Bekasi dari waktu ke waktu mengalami fluktuasi dan sangat beragam antar antar kelompok pangan maupun antar jenis pangan dalam suatu kelompok pangan. Secara agroekologis, wilayah Kota Bekasi bukan merupakan daerah yang memiliki potensi sebagai daerah sentra produksi pangan, sehingga secara otomatis memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pasokan pangan dari wilayah lain. Selain itu, wilayah Kota Bekasi berperan pula sebagai kolektor dan distributor beberapa komoditas pangan strategis dari dan ke wilayah lain, khususnya ke wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Oleh karena itu, analisis tingkat ketergantungan wilayah terhadap pasokan pangan dari luar wilayah menjadi lebih penting dibandingkan analisis tingkat swasembada pangan.



Gambar V.A.1. Estimasi Volume Penyediaan Per Kelompok Pangan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi Tahun 2024

Berdasarkan data hasil perhitungan pada Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi Tahun 2024, kelompok pangan padi-padian memiliki volume penyediaan yang paling besar dibandingkan kelompok pangan lainnya, yaitu mencapai sekitar 534,826.7 ton/tahun. Sebagaimana data yang disajikan pada Gambar V.A.1 buah-buahan dan sayuran merupakan dua kelompok pangan yang memiliki volume penyediaan yang cukup besar dibandingkan kelompok pangan lainnya selain padi-padian (masing-masing mencapai 222.417,1 dan 191.423,9 ton/tahun). Sementara kelompok pangan yang volume penediaannya paling rendah di Kota Bekasi berdasarkan data Neraca Bahan Makanan tahun 2024 adalah gula yang hanya mencapai 22,889.6 ton/tahun.

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel V.A.1. secara umum total volume penyediaan pangan di wilayah Kota Bekasi tahun 2024 mencapai lebih dari 1.358.136,6 ton/tahun. Sebagian besar penyediaan pangan tersebut merupakan pasokan dari luar wilayah Kota Bekasi (97,3 %). Buah/biji berminyak dan gula merupakan kelompok pangan yang memiliki tingkat ketergantungan paling rendah (100,0%). merupakan kelompok pangan yang memiliki tingkat ketergantungan paling rendah (82,0%) Kelompok daging dengan volume produksi yang mencapai sekitar 10,943,3 ribu ton/tahun.

Tabel V.A.1. Estimasi Volume Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Per Kelompok Pangan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi

No	Jenis Pangan	Jumlah Pangan (Ton)				Tingkat Kemandirian (%)	
		Produksi	Net Impor Ekspor	Penyediaan	%	Swasembada	Ketergantungan
1.	Padi-padian	961,2	531.360,3	532.321,5	39,2	0,2	99,8
2.	Makanan Berpati	229,5	77.348,0	77.577,5	5,7	0,3	99,7
3.	Gula	0,0	27.467,6	27.467,6	2,0	0,0	100,0
4.	Buah/Biji Berminyak	0,0	54.277,3	54.277,3	4,0	0,0	100,0
5.	Buah-Buahan	12.109,1	209.253,6	222.417,1	16,4	5,4	94,1
6.	Sayuran	6.934,4	184.064,8	190.999,2	14,1	3,6	96,4
7.	Daging	10.943,3	49.705,1	60.648,4	4,5	18,0	82,0
8.	Telur	2.251,1	37.671,3	39.922,4	2,9	5,6	94,4
9.	Susu	44,8	17.277,5	17.322,3	1,3	0,3	99,7
10.	Ikan	1.916,3	80.367,1	82.283,5	6,1	2,3	97,7
11.	Minyak & Lemak	649,8	52.250,2	52.900,0	3,9	1,2	98,8
Total Pangan		36.039,5	1.321.042,6	1.358.136,6	100,0	2,7	97,3

Kelompok buah-buahan dan sayuran merupakan kelompok pangan lain yang memiliki volume produksi yang relatif signifikan dengan volume produksi mencapai masing-masing sekitar 12,109,1 dan 6.934,4 ton/tahun. Namun demikian tingkat ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah juga masih sangat tinggi yang masing-masing mencapai sekitar 94,1 dan 96,4 persen.

B. Tingkat Penyediaan Per Komoditas Pangan

1. Padi-padian

Situasi penyediaan pangan di wilayah Kota Bekasi berdasarkan hasil perhitungan NBM tahun 2024 untuk kelompok pangan padi-padian disajikan pada Tabel V.B.1. Bahan pangan utama yang termasuk dalam kelompok padi-padian terdiri dari : beras, jagung, dan terigu. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, total penyediaan pangan kelompok padi-padian di wilayah Kota Bekasi pada tahun 2024 mencapai sekitar 443.714,3 ton beras, 764,8 ton jagung

pipilan, 159,6 ton jagung basah, dan 87.682,9 ton terigu. Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel V.B.1 secara umum terlihat bahwa kelompok pangan padi-padian, memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pasokan dari luar daerah, khususnya untuk tepung terigu. Terigu merupakan salah satu jenis pangan yang sepenuhnya dipasok dari luar daerah, sedangkan untuk beras dan jagung, hasil produksi masih memberikan kontribusi meskipun kurang signifikan.

Tabel V.B.1. Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Padi-padian Berdasarkan Data Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi

No	Jenis Pangan	Jumlah Pangan (Ton)			Tingkat Kemandirian (%)	
		Produksi	Net Impor Ekspor	Penyediaan	Swasembada	Ketergantungan
1.	Beras Giling	776,8	442.937,5	443.714,3	0,2	99,8
2.	Jagung Pipilan	24,8	740,0	764,8	3,2	96,8
3.	Jagung Basah	159,6	0,0	159,6	100,0	0,0
4.	Tepung Terigu	0,0	87.682,9	87.682,9	0,0	100,0

2. Makanan Berpati

Kelompok makanan berpati khususnya umbi-umbian merupakan jenis pangan yang kaya akan karbohidrat sebagai sumber energi yang diharapkan mampu menjadi alternatif pilihan pangan dalam rangka mengurangi tingginya ketergantungan terhadap konsumsi beras dan tepung terigu. Oleh karena itu, penyediaan kelompok pangan ini perlu mendapat perhatian serius dalam upaya mendukung peningkatan ketahanan pangan melalui diversifikasi konsumsi pangan penduduk. Data situasi penyediaan pangan di wilayah Kota Bekasi berdasarkan perhitungan NBM tahun 2024 kelompok pangan makanan berpati disajikan pada Tabel V.B.2.

Tabel V.B.2. Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Makanan Berpati Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi

No	Jenis Pangan	Jumlah Pangan (Ton)			Tingkat Kemandirian (%)	
		Produksi	Net Impor Ekspor	Penyediaan	Swasembada	Ketergantungan
1.	Ubi Jalar	0,0	12.412,4	12.412,4	0,0	100,0
2.	Ubi Kayu	229,5	64.015,5	64.245,0	0,4	99,6
3	Tepung Sagu	0,0	920,0	920,0	0,0	100,0

Data yang disajikan pada V.B.2 di atas, penyediaan pangan kelompok makanan berpati di wilayah Kota Bekasi pada tahun 2024 untuk ubi jalar mencapai 12.412,4 ton/tahun, ubi kayu 64.245,0 ton/tahun, dan tepung sagu 920,0 ton/tahun. Penyediaan pangan untuk komoditas ubi

jalar, ubi kayu dan tepung sagu yang merupakan salah satu pangan sumber karbohidrat selain beras di Kota Bekasi, ternyata memiliki tingkat ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah yang sangat tinggi. Meskipun masih terdapat hasil produksi yang cukup signifikan khususnya ubi kayu 189.6 ton/tahun, tetapi masih relatif sangat kecil dibandingkan tingkat penyediaannya.

3. Gula

Gula merupakan produk industri olahan pangan, baik skala rumah tangga maupun skala pabrik. Mengingat wilayah Kota Bekasi bukan wilayah perkebunan tebu sebagai bahan baku gula pasir, maka penyediaan pangan untuk jenis pangan tersebut sepenuhnya diperoleh dari luar wilayah Kota Bekasi. Berdasarkan hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi, gula pasir merupakan pangan utama kelompok gula dengan total penyediaan mencapai 24.396,0 ton/tahun. Sementara itu, penyediaan gula merah pada tahun yang sama hanya sekitar 3.071,5 ton/tahun. Kedua jenis pangan tersebut sepenuhnya bersumber dari luar daerah sebagaimana disajikan pada Tabel V.B.3.

Tabel V.B.3. Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Gula di Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi

No	Jenis Pangan	Jumlah Pangan (Ton)			Tingkat Kemandirian (%)	
		Produksi	Net Impor Ekspor	Penyediaan	Swa-sembada	Ketergantungan
1.	Gula Pasir	0,0	24.396,0	24.396,0	0,0	100,0
2.	Gula Merah	0,0	3.071,5	3.071,5	0,0	100,0

4. Buah/Biji Berminyak

Jenis bahan pangan utama yang termasuk dalam kelompok buah/biji berminyak adalah: kacang tanah, kacang kedele, kacang hijau, dan kelapa. Data penyediaan pangan di wilayah Kota Bekasi berdasarkan hasil perhitungan NBM tahun 2024 untuk kelompok pangan tersebut disajikan pada Tabel V.B.4. Seperti halnya kelompok gula, kelompok pangan Buah/biji berminyak hampir sepenuhnya dipasok dari luar wilayah Kota Bekasi. Total penyediaan pangan kelompok buah/biji berminyak di wilayah Kota Bekasi pada tahun 2024 untuk kacang tanah mencapai 1.265,0 ton, kacang kedelai 47.128,6 ton, kacang hijau 1.723,3 ton dan kelapa berkulit 4.160,5 ton per tahun. Kacang kedelai merupakan jenis bahan pangan kelompok buah/biji berminyak yang paling banyak dibutuhkan penduduk di wilayah Kota Bekasi. Kacang kedelai merupakan bahan baku utama komoditas tahu dan tempe yang banyak dan hampir dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia termasuk di Kota Bekasi.

Tabel V.B.4. Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Gula Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi

No	Jenis Pangan	Jumlah Pangan (Ton)			Tingkat Kemandirian (%)	
		Produksi	Net Impor Ekspor	Penyediaan	Swasembada	Ketertanggung
1.	Kacang Tanah	0,0	1.265,0	1.265,0	0,0	100,0
2.	Kacang Kedelai	0,0	47.128,6	47.128,6	0,0	100,0
3.	Kacang Hijau	0,0	1.723,3	1.723,3	0,0	100,0
4.	Kelapa Daging	0,0	4.160,5	4.160,5	0,0	100,0

5. Buah-buahan

Jeruk merupakan jenis buah-buahan dengan volume penyediaan yang paling besar di wilayah Kota Bekasi yaitu sekitar 34,739,3 ton. Disisi lain, produksinya relatif tidak signifikan sehingga kebutuhan konsumsi penduduk hampir sepenuhnya dipasok dari luar Wilayah Kota Bekasi. Berdasarkan data Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi, jenis buah-buahan lain dengan volume penyediaan di wilayah Kota Bekasi yang relatif besar dibandingkan komoditas yang lain adalah pisang (32.767,3 ton) dan pepaya (30.610,5 ton). Produksi kedua jenis buah tersebut, relatif lebih signifikan sehingga tingkat ketergantungannya sedikit lebih rendah (91-92 persen).

Tabel V.B.5. Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Buah-Buahan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi

No	Jenis Pangan	Jumlah Pangan (Ton)			Tingkat Kemandirian (%)	
		Produksi	Net Impor Ekspor	Penyediaan	Swasembada	Ketertanggung
1.	Alpoket	455,3	9.496,7	9.952,0	4,6	95,4
2.	Jeruk	8,9	34.730,4	34.739,3	0,0	100,0
3.	D u k u	187,2	16.139,9	16.327,1	1,1	98,9
4.	Durian	171,2	9.372,1	9.543,3	1,8	98,2
5.	Jambu	2.033,1	0,0	2.033,1	100,0	0,0
6.	Mangga	1.761,3	0,0	1.761,3	100,0	0,0
7.	Pepaya	2.600,8	28.009,7	30.610,5	8,5	91,5
8.	Pisang	2.667,8	30.099,5	32.767,3	8,1	91,9
9.	Rambutan	1.343,5	0,0	1.343,5	100,0	0,0
10.	Salak	0,0	14.572,0	14.572,0	0,0	100,0
11.	Semangka	0,0	20.393,7	20.393,7	0,0	100,0
12.	Belimbing	867,3	0,0	867,3	100,0	0,0
13.	Apel	0,0	10.000,4	10.000,4	0,0	100,0
14.	Lainnya	1.067,2	36.439,3	37.506,5	2,8	97,2

Buah-buahan lain dengan penyediaan yang cukup tinggi dibandingkan komoditas lain adalah semangka (20.393,7 ton), salak (14.572,0 ton), apel (10.000,4 ton), alpokat (9.952,0 ton), dan durian (9.543,3 ton). Secara umum data pada Tabel V.B.5 juga menunjukkan bahwa pasokan buah-buahan ke Wilayah Kota Bekasi jauh melebihi kebutuhan konsumsi penduduknya, sehingga sebagian komoditas buah-buahan yang ada di Wilayah Kota Bekasi juga dipasok ke wilayah lain khususnya ke wilayah DKI Jakarta. Hal tersebut menunjukkan bahwa wilayah Kota Bekasi masih memegang peranan yang strategis dalam pengembangan agribisnis untuk beberapa komoditas buah-buahan tersebut.

6. Sayuran

Berdasarkan data hasil perhitungan NBM tahun 2024 disajikan pada Tabel V.B.6 volume penyediaan sayur-sayuran relatif lebih merata dibandingkan dengan kelompok buah-buahan. Komoditas sayuran yang paling besar volume penyediaannya adalah adalah cabai yaitu sekitar 35.986,6 ton/tahun dengan tingkat ketergantungan pasokan dari luar wilayah mencapai 98,7 persen. Komoditas sayuran yang memiliki tingkat ketergantungan relatif lebih rendah dibandingkan jenis sayuran lainnya adalah bayam (88,5 %), kangkung (90,4 %) dan sawi (91,5 %). Penyediaan dari hasil produksi setempat untuk ketiga komoditas sayuran tersebut mencapai 2.242,8 ton (bayam), 1.970,8 ton (kangkung), dan 1.850,8 ton (sawi).

Tabel V.B.6. Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Buah-Buahan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi

No	Jenis Pangan	Jumlah Pangan (Ton)			Tingkat Kemandirian (%)	
		Produksi	Net Impor Ekspor	Penyediaan	Swasembada	Ketergantungan
1.	Bawang Merah	0,0	21.818,2	21.818,2	0,0	100,0
2.	Bawang Putih	0,0	14.334,0	14.334,0	0,0	100,0
3.	Ketimun	0,0	12.693,6	12.693,6	0,0	100,0
4.	Kacang Panjang	189,0	9.465,7	9.654,7	2,0	98,0
5.	Tomat	0,0	1.183,5	1.183,5	0,0	100,0
6.	Cabai	485,0	35.501,6	35.986,6	1,3	98,7
7.	Terung	196,0	8.486,1	8.682,1	2,3	97,7
8.	Sawi	1.850,8	20.006,5	21.857,3	8,5	91,5
9.	Kangkung	1.970,8	18.523,9	20.494,7	9,6	90,4
10.	Labu siam	0,0	10.269,9	10.269,9	0,0	100,0
11.	Buncis	0,0	7.849,1	7.849,1	0,0	100,0
12.	Bayam	2.242,8	17.236,7	19.479,5	11,5	88,5
13.	Sayuran lainnya	0,0	6.696,1	6.696,1	0,0	100,0

Dari berbagai jenis-jenis pangan kelompok sayuran tersebut diatas bawang merah, bawang putih, ketimun, tomat, labu siam, dan buncis merupakan komoditas-komoditas yang penyediaannya seratus persen diperoleh dari luar daerah. Sementara itu untuk kacang panjang, cabai, dan terung jumlah produksinya masih cukup signifikan sehingga tidak sepenuhnya tergantung pada pasokan dari luar wilayah Kota Depok.

Secara umum data pada Tabel V.B.6 juga menunjukkan bahwa sebagaimana komoditas buah-buahan, jumlah pasokan komoditas sayur-sayuran ke Wilayah Kota Bekasi juga jauh melebihi kebutuhan konsumsi penduduknya, sehingga sebagian komoditas sayur-sayuran yang ada di Wilayah Kota Bekasi juga dipasok lagi ke wilayah lain khususnya ke wilayah DKI Jakarta. Hal tersebut menunjukkan bahwa wilayah Kota Bekasi masih memegang peranan yang sangat strategis dalam pengembangan agribisnis untuk beberapa komoditas sayuran tersebut.

7. Daging

Kelompok daging merupakan sumber utama protein hewani, sehingga tingkat ketersediaannya akan sangat berpengaruh terhadap tingkat ketersediaan protein yang dibutuhkan penduduk di suatu wilayah. Data penyediaan pangan untuk kelompok daging di wilayah Kota Bekasi berdasarkan hasil perhitungan NBM tahun 2024 disajikan pada Tabel V.B.7. Data yang disajikan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa pangan kelompok daging yang paling dominan volume penyediaannya adalah daging ayam ras (44.256,1 ton/tahun).

Tabel V.B.7. Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Daging di Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi

No	Jenis Pangan	Jumlah Pangan (Ton)			Tingkat Kemandirian (%)	
		Produksi	Net Impor Ekspor	Penyediaan	Swasembada	Ketertgantungan
1.	Daging Sapi	3.271,7	1.722,3	4.994,0	65,5	34,5
2.	Daging Kerbau	13,0	6,8	19,8	65,5	34,5
3.	Daging Kambing	2.509,8	1.321,3	3.831,1	65,5	34,5
4.	Daging Domba	1.992,5	1.048,9	3.041,4	65,5	34,5
5.	Ayam Buras	63,7	2.320,6	2.384,2	2,7	97,3
6.	Ayam Ras	1.181,8	43.074,3	44.256,1	2,7	97,3
7.	Daging Itik	5,8	210,9	216,7	2,7	97,3
8.	Jeroan Ternak	1.905,1	0,0	1.905,1	100,0	0,0

Tingkat ketertgantungan terhadap pasokan dari luar untuk kelompok daging ruminansia, khususnya untuk daging sapi, kambing dan domba di Wilayah Kota Bekasi pada tahun 2024 relatif lebih rendah dibandingkan dengan kelompok daging unggas. Hal ini sedikit banyak berhubungan

dengan relatif cukup signifikannya hasil produksi daging ruminansia di wilayah Kota Bekasi, khususnya daging sapi yang mencapai 3.271,7 ton/tahun sehingga tingkat kemandiriannya mencapai sekitar 34,5 persen.

Produksi daging unggas, khususnya ayam ras di Kota Bekasi relatif rendah (1.495,4 ton/tahun) dibandingkan total penyediannya yang mencapai sekitar 44.256,1 ton/tahun sehingga tingkat kemandiriannya hanya mencapai sekitar 2,7 persen. Sementara itu, meskipun penyediaannya relatif kecil dibandingkan ayam ras, penyediaan daging ayam buras dan daging itik hampir sepenuhnya mengandalkan pasokan dari luar wilayah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa berdasarkan data Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi, wilayah Kota Bekasi tingkat ketergantungan pangan untuk kelompok komoditas daging masih relatif lebih rendah dibandingkan kelompok komoditas pangan lainnya, dimana tingkat ketergantungannya berkisar 34,5 – 97,3 persen.

8. Telur

Secara umum sebagaimana dapat dilihat pada Tabel V.B.8 terlihat bahwa produksi pangan kelompok telur di Kota Bekasi hanya dapat memenuhi kurang dari 6,0 persen dari total penyediaan pangan. Dengan kata lain lebih dari 94,0 persen penyediaan pangan kelompok telur dipasok dari luar wilayah Kota Bekasi. Berdasarkan data Neraca Bahan Makanan Tahun 2024, penyediaan pangan kelompok telur didominasi oleh telur ayam ras yang mencapai 32.898,8 ton dengan tingkat ketergantungan terhadap pasokan dari luar mencapai 94,2 persen. Sementara untuk komoditas telur ayam buras dan telur itik penyediaannya relatif kecil dibandingkan telur ayam ras dengan tingkat ketergantungan sekitar 95,0 persen.

Tabel V.B.8. Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Telur Berdasarkan Data Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi

No	Jenis Pangan	Jumlah Pangan (Ton)			Tingkat Kemandirian (%)	
		Produksi	Net Impor Ekspor	Penye-diaan	Swasembada	Ketergantungan
1.	Telur Ayam Buras	235,9	4.847,6	5.083,5	4,6	95,4
2.	Telur Ayam Ras	1.909,3	30.989,6	32.898,8	5,8	94,2
3.	Telur Itik	106,0	1.834,1	1.940,0	5,5	94,5

9. Susu

Penyediaan pangan kelompok susu, khususnya jenis susu impor di wilayah Kota Bekasi secara umum sangat tergantung pada pasokan dari luar daerah. Sebagaimana data yang disajikan pada Tabel V.B.9 dibawah, volume penyediaan susu impor di wilayah Kota Bekasi pada tahun

2024 mencapai sekitar 22,361.2 ton. Sementara itu, susu sapi segar penyediaannya lebih kecil dibandingkan susu impor, dimana penyediannya hanya dari hasil setempat yaitu sekitar 117 ton/tahun.

Tabel V.B.9. Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Susu Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi

No	Jenis Pangan	Jumlah Pangan (Ton)			Tingkat Kemandirian (%)	
		Produksi	Net Impor Ekspor	Penyediaan	Swasembada	Ketergantungan
1.	Susu Sapi	117.0	0.0	117.0	100.0	0.0
2.	Susu Impor	0.0	22,361.2	22,361.2	0.0	100.0

10. Ikan

Sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar sebagai penghasil sumberdaya kelautan, khususnya komoditas ikan sebagai sumber protein hewani. Namun demikian, potensi tersebut tidak dimiliki oleh wilayah Kota Bekasi yang tidak memiliki wilayah laut dan hanya memiliki wilayah perairan darat yang sangat terbatas.

Tabel V.B.10. Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Ikan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi

No	Jenis Pangan	Jumlah Pangan (Ton)			Tingkat Kemandirian (%)	
		Produksi	Net Impor Ekspor	Penyediaan	Swasembada	Ketergantungan
1.	Tongkol	0,0	19.491,2	19.491,2	0,0	100,0
2.	Kakap	0,0	805,3	805,3	0,0	100,0
3.	Bawal	0,0	2.569,4	2.569,4	0,0	100,0
4.	Teri	0,0	2.987,4	2.987,4	0,0	100,0
5.	Kembung	0,0	11.336,2	11.336,2	0,0	100,0
6.	Tenggiri	0,0	383,5	383,5	0,0	100,0
7.	Bandeng	0,0	4.222,3	4.222,3	0,0	100,0
8.	Mujair	123,0	10.810,4	10.933,4	1,1	98,9
9.	Ikan mas	0,0	5.464,8	5.464,8	0,0	100,0
10.	Udang	0,0	5.890,5	5.890,5	0,0	100,0
11.	Kepiting	0,0	651,9	651,9	0,0	100,0
12.	Kerang darah	0,0	1.700,8	1.700,8	0,0	100,0
13.	Cumi-cumi	0,0	3.618,3	3.618,3	0,0	100,0
14.	Lainnya	1.793,3	10.434,9	12.228,3	14,7	85,3

Secara umum, berdasarkan data yang disajikan pada Tabel V.B.10 menunjukkan bahwa sebagian besar ikan, terutama kelompok ikan laut, yang tersedia di Wilayah Kota Bekasi sepenuhnya dipasok dari luar wilayah. Berdasarkan hasil analisis data Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi yang disajikan pada Tabel V.B.10 tersebut diatas juga menunjukkan bahwa ikan tongkol dan ikan kembung merupakan komoditas ikan laut yang relatif lebih tinggi tingkat penyediannya dibandingkan kelompok ikan laut lainnya. Sementara itu untuk ikan mujair dan ikan air tawar lainnya masih memiliki penyediaan dari hasil produksi yang cukup signifikan di wilayah Kota Bekasi yaitu masing-masing sekitar 123.0 ton dan 1,793,3 ton per tahun., sehingga tingkat ketergantungan terhadap pasokan dari luarnya masih sekitar 85.3 dan 98.9 persen.

11. Minyak dan Lemak

Penyediaan pangan kelompok minyak dan lemak, khususnya minyak kelapa sawit di wilayah Kota Bekasi sangat tergantung impor dari luar daerah. Sementara untuk pangan kelompok lemak, meskipun penyediannya tidak langsung tergantung pada pasokan dari luar daerah, tetapi tingkat ketergantungannya juga tinggi mengingat lemak merupakan jenis pangan bawaan dari pangan-pangan kelompok daging yang memiliki ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah yang tinggi.

Tabel V.B.11. Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Minyak dan Lemak Berdasarkan Data Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi

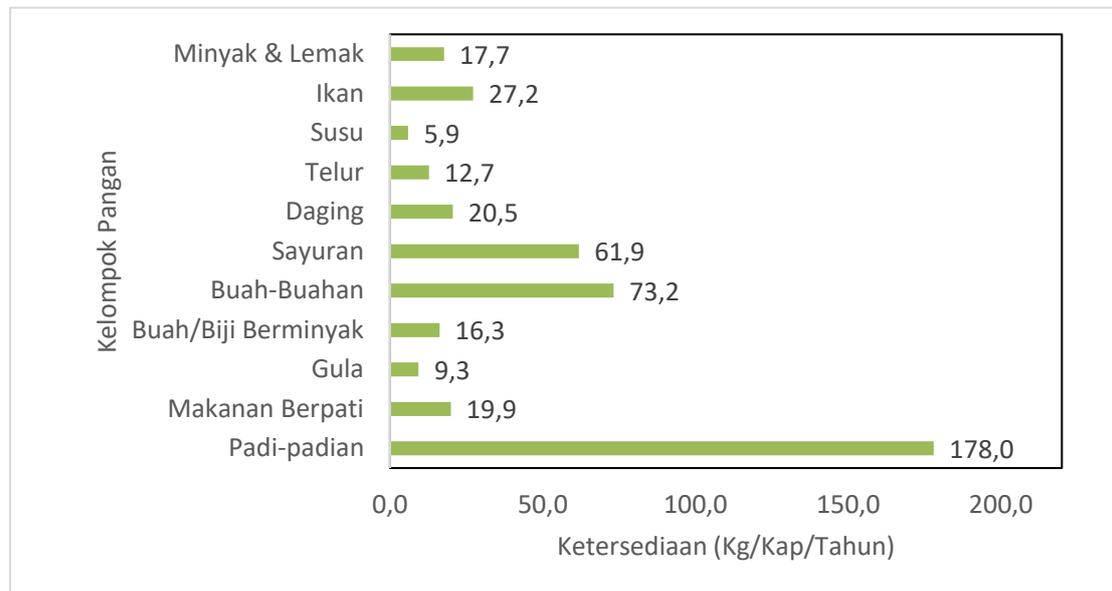
No	Jenis Pangan	Jumlah Pangan (Ton)			Tingkat Kemandirian (%)	
		Produksi	Net Impor Ekspor	Penyediaan	Swa-sembada	Ketergantungan
1.	Minyak Kelapa	344,3	3.237,1	3.581,4	9,6	90,4
2.	Minyak Sawit	0,0	49.013,2	49.013,2	0,0	100,0
3.	Lemak Sapi	122,7	0,0	122,7	100,0	0,0
4.	Lemak Kerbau	0,5	0,0	0,5	100,0	0,0
5.	Lemak Kambing	100,4	0,0	100,4	100,0	0,0
6.	Lemak Domba	81,9	0,0	81,9	100,0	0,0

Data penyediaan pangan untuk kelompok minyak dan lemak di wilayah Kota Bekasi berdasarkan hasil perhitungan NBM tahun 2024 disajikan pada Tabel V.B.11. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel tersebut, jenis pangan utama yang paling banyak volume penyediannya untuk pangan kelompok minyak dan lemak adalah minyak sawit dengan total penyediaan sebanyak 49.013,2 per tahun.

VI. TINGKAT KETERSEDIAAN PANGAN

A. Situasi Ketersediaan Per Kelompok Pangan

Tingginya tingkat penyediaan pangan di suatu wilayah belum dapat menjadi jaminan tingginya tingkat ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduknya. Pola penanganan dan penggunaan pangan di suatu wilayah sejak pasca panen dan selama proses didistribusi sampai siap dikonsumsi oleh masyarakat konsumen juga sangat menentukan tingkat ketersediaan pangan untuk kebutuhan konsumsi penduduk. Selain itu pada akhirnya ditentukan pula oleh jumlah populasi penduduk yang menetap di wilayah yang bersangkutan. Oleh karena itu sesuai dengan tujuan utama kegiatan penyusunan dan analisis Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi, telaahan lebih lanjut terhadap data tingkat ketersediaan pangan wilayah maupun per kapita penduduk perlu dilakukan untuk dapat menilai situasi ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk di Kota Bekasi.



Gambar VI.A.1. Estimasi Situasi Ketersediaan Per Kelompok Pangan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi Tahun 2024

Berdasarkan data hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi sebagaimana disajikan pada Gambar VI.A.1 terlihat bahwa sejalan dengan tingkat penyediannya, kelompok pangan padi-padian memiliki tingkat ketersediaan paling besar dibandingkan kelompok pangan lainnya, yaitu mencapai sekitar 178,0 kg/kapita/tahun. Kelompok buah-buahan dan kelompok sayuran merupakan kelompok pangan selain padi-padian yang memiliki tingkat ketersediaan yang cukup besar dibandingkan kelompok pangan lainnya selain padi-padian (masing-masing mencapai 73,8 dan 61,9 kg/kap/tahun).

Sementara kelompok pangan yang volume tingkat ketersediaannya relatif rendah dibandingkan yang lainnya berdasarkan Neraca Bahan Makanan Tahun Kota Bekasi Tahun 2024 adalah susu dan gula yang hanya mencapai sekitar 5,9 dan 9,3 kg/kapita/tahun. Kontribusi masing-masing kelompok pangan berdasarkan volume dan asal pangan serta tingkat ketersediaannya disajikan pada Tabel VI.A.1.

Tabel VI.A.1. Ketersediaan Pangan Kelompok Padi-padian Untuk Konsumsi Penduduk Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi

No	Jenis Pangan	Penyediaan (Ton/Tahun)	Ketersediaan (Ton/Tahun)		Ketersediaan Per Kapita		Kontri busi (%)
			Non Konsumsi	Konsumsi	Kg/ Tahun	Gram/ Hari	
1.	Padi-padian	532.321,5	64.656,9	467.664,6	178,0	487,7	40,2
2.	Makanan Berpati	77.577,5	25.308,5	52.269,0	19,9	54,5	4,5
3.	Gula	27.467,6	3.005,4	24.462,2	9,3	25,5	2,1
4.	Buah/Biji Berminyak	54.277,3	11.542,5	42.734,8	16,3	44,6	3,7
5.	Buah-Buahan	222.417,1	29.987,8	192.429,3	73,2	200,7	16,5
6.	Sayuran	190.999,2	28.445,7	162.553,4	61,9	169,5	14,0
7.	Daging	60.648,4	6.671,3	53.977,1	20,5	56,3	4,6
8.	Telur	39.922,4	6.471,7	33.450,7	12,7	34,9	2,9
9.	Susu	17.322,3	1.739,3	15.583,0	5,9	16,3	1,3
10.	Ikan	82.283,5	10.696,8	71.586,6	27,2	74,7	6,2
11.	Minyak dan Lemak	52.900,0	6.425,9	46.474,2	17,7	48,5	4,0
Total Pangan		1.358.136,6	194.951,7	1.163.184,9	442,7	1.213,0	100,0

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel VI.A.1 diatas secara umum volume total ketersediaan pangan di wilayah Kota Bekasi berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi mencapai sekitar 442,7 kg/kapita/tahun atau sekitar 1.213,0 gr/kapita hari. Ketersediaan pangan tersebut terutama terdiri dari 40,2 persen padi-padian, 16,5 persen buah-buahan dan 14,0 persen sayuran. Sementara kelompok pangan hewani seperti daging, telur, susu, ikan serta minyak dan lemak masing-masing memiliki kontribusi ketersediaan kurang dari 10 persen dari volume total ketersediaan pangan di Kota Bekasi. Demikian pula untuk kelompok makanan berpati, gula, dan buah/biji berminyak.

B. Tingkat Ketersediaan Per Komoditas Pangan

1. Padi-padian

Tingkat ketersediaan pangan kelompok padi-padian untuk konsumsi penduduk di Kota Bekasi berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi disajikan pada Tabel VI.B.1. Komoditas utama pangan kelompok padi-padian adalah beras dengan total ketersediaan mencapai 388.028,1 ton/tahun. Sementara ketersediaan komoditas jagung terdiri dari 623,3 ton jagung pipilan dan 98,6 ton jagung basah. Sedangkan untuk terigu total ketersediaannya mencapai 78.914,6

ton/tahun. Dengan total ketersediaan pangan kelompok padi-padian dan tepung terigu tersebut, maka rata-rata ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk di wilayah Kota Bekasi pada Tahun 2024 yang signifikan hanyalah 147,7 kg beras, dan sekitar 30.0 kg terigu per kapita/tahun.

Tabel VI.B.1. Ketersediaan Pangan Kelompok Padi-padian Untuk Konsumsi Penduduk Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi

No	Jenis Pangan	Penyediaan (Ton/Tahun)	Ketersediaan (Ton/Tahun)		Ketersediaan Per Kapita	
			Non Konsumsi	Konsumsi	Kg/Tahun	Gram/Hari
1.	Beras Giling	443.714,3	55.686,1	388.028,1	147,7	404,6
2.	Jagung Pipilan	764,8	141,5	623,3	0,2	0,6
3.	Jagung Basah	159,6	61,0	98,6	0,0	0,1
4.	Tepung Terigu	87.682,9	8.768,3	78.914,6	30,0	82,3

2. Makanan Berpati

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel VI.B.2, maka ketersediaan pangan kelompok makanan berpati di wilayah Kota Bekasi pada tahun 2024 yang paling dominan adalah ubi kayu dengan total ketersediaan sekitar 41.759,3 ton atau sekitar 15,9 kg/kapita per tahun. Komoditas umbi-umbian lainnya adalah ubi jalar dengan tingkat ketersediaan mencapai 9.681,7 ton atau sekitar 3,7 kg/kapita per tahun. Sementara itu untuk tepung sagu tingkat ketersediaannya relatif sangat kecil (< 1 kg/kapita/tahun) jika dibandingkan dengan ketersediaan ubi kayu dan ubi jalar.

Tabel VI.B.2. Ketersediaan Pangan Kelompok Makanan Berpati Untuk Konsumsi Penduduk Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi

No	Jenis Pangan	Penyediaan (Ton/Tahun)	Ketersediaan (Ton/Tahun)		Ketersediaan Per Kapita	
			Non Konsumsi	Konsumsi	Kg/Tahun	Gram/Hari
1.	Ubi Jalar	12.412,4	2.730,7	9.681,7	3,7	10,1
2.	Ubi Kayu	64.245,0	22.485,8	41.759,3	15,9	43,5
3	Tepung Sagu	920,0	92,0	828,0	0,3	0,9

Makanan berpati khususnya umbi-umbian merupakan alternatif jenis pangan yang kaya akan karbohidrat sebagai sumber energi yang diharapkan mampu mengurangi tingginya ketergantungan terhadap konsumsi beras dan tepung terigu. Oleh karena itu, ketersediaan kelompok pangan ini perlu mendapat perhatian serius dalam upaya mendukung peningkatan ketahanan pangan melalui diversifikasi konsumsi pangan penduduk.

3. Gula

Sebagaimana disajikan pada Tabel VI.B.3, total ketersediaan gula pasir berdasarkan data Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi mencapai 17,497.9 ton atau sekitar 8.3 kg/kapita/tahun. Sementara itu, rata-rata ketersediaan gula merah relatif kecil (1,1 kg/kapita/tahun) jika dibandingkan dengan gula pasir.

Tabel VI.B.3. Rata-Rata Ketersediaan Pangan Kelompok Gula Untuk Konsumsi Penduduk Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi

No	Jenis Pangan	Penyediaan (Ton/Tahun)	Ketersediaan (Ton/Tahun)		Ketersediaan Per Kapita	
			Non Konsumsi	Konsumsi	Kg/Tahun	Gram/Hari
1.	Gula Pasir	24.396,0	2.698,2	21.697,8	8,3	22,6
2.	Gula Merah	3.071,5	307,2	2.764,4	1,1	2,9

4. Buah/Biji Berminyak

Bahan pangan utama yang termasuk dalam kelompok buah/biji berminyak terdiri dari : kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, dan kelapa daging. Data ketersediaan pangan untuk kebutuhan konsumsi penduduk di wilayah Kota Bekasi berdasarkan hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi untuk kelompok pangan buah/biji berminyak disajikan pada Tabel VI.B.4.

Tabel VI.B.4. Rata-Rata Ketersediaan Pangan Kelompok Buah/Biji Berminyak Untuk Konsumsi Penduduk Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi

No	Jenis Pangan	Penyediaan (Ton/Tahun)	Ketersediaan (Ton/Tahun)		Ketersediaan Per Kapita	
			Non Konsumsi	Konsumsi	Kg/Tahun	Gram/Hari
1.	Kacang Tanah	1.265,0	297,4	967,6	0,4	1,0
2.	Kacang Kedelai	47.128,6	8.172,1	38.956,5	14,8	40,6
3.	Kacang Hijau	1.723,3	293,0	1.430,3	0,5	1,5
4.	Kelapa Daging	4.160,5	2.780,0	1.380,4	0,5	1,4

Total ketersediaan pangan kelompok buah/biji berminyak di wilayah Kota Bekasi pada tahun 2024 yang paling dominan adalah kacang kedelai yang mencapai sekitar 38.956,5 ton atau sekitar 14,8 kg/kapita/tahun. Sementara itu tingkat ketersediaan untuk kelompok buah/biji berminyak lainnya yaitu kacang tanah, kacang hijau dan kelapa berkulit relatif sangat sedikit dengan tingkat ketersediaan hanya mencapai kurang dari 1 kg/kapita/tahun.

5. Buah-buahan

Situasi ketersediaan pangan di wilayah Kota Bekasi berdasarkan data hasil perhitungan NBM tahun 2024 untuk kelompok pangan buah-buahan disajikan pada Tabel VI.B.5. Sebagaimana situasi penyediannya, rata-rata tingkat ketersediaan pangan kelompok buah-buahan yang paling dominan di wilayah Kota Bekasi adalah jeruk (29.907,1 ton atau sekitar 11,4 kg/kapita), pisang (27.950,5 ton atau sekitar 10,6 kg/kapita), dan pepaya (25.651,6 ton atau sekitar 9,8 kg/kapita).

Tabel VI.B.5. Rata-Rata Ketersediaan Pangan Kelompok Buah-Buahan Untuk Konsumsi Penduduk Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi

No	Jenis Pangan	Penyediaan (Ton/Tahun)	Ketersediaan (Ton/Tahun)		Ketersediaan Per Kapita	
			Non Konsumsi	Konsumsi	Kg/Tahun	Gram/Hari
1.	Alpokot	9.952,0	1.075,8	8.876,2	3,4	9,3
2.	Jeruk	34.739,3	4.832,2	29.907,1	11,4	31,2
3.	D u k u	16.327,1	1.931,9	14.395,2	5,5	15,0
4.	Durian	9.543,3	1.908,7	7.634,6	2,9	8,0
5.	Jambu	2.033,1	219,8	1.813,3	0,7	1,9
6.	Mangga	1.761,3	299,4	1.461,8	0,6	1,5
7.	Pepaya	30.610,5	4.958,9	25.651,6	9,8	26,8
8.	Pisang	32.767,3	4.816,8	27.950,5	10,6	29,1
9.	Rambutan	1.343,5	145,2	1.198,3	0,5	1,2
10.	Salak	14.572,0	1.578,1	12.993,9	4,9	13,6
11.	Semangka	20.393,7	2.208,6	18.185,0	6,9	19,0
12.	Belimbing	867,3	93,9	773,3	0,3	0,8
13.	Apel	10.000,4	1.083,0	8.917,3	3,4	9,3
14.	Lainnya	37.506,5	4.062,0	33.444,5	12,7	34,9

Jenis buah-buahan lain yang tingkat ketersediaannya relatif signifikan dibandingkan yang lainnya adalah semangka (6,9 kg/kapita), duku (5,5 kg/kapita), salak (4,9 kg/kapita), alpokat (3,5 kg/kapita), apel (3,4 kg/kapita), durian (2,9 kg/kapita), dan lainnya (12,7 kg/kapita). Sementara untuk komoditas buah-buahan lain seperti jambu, mangga, rambutan, dan belimbing tingkat ketersediaannya relatif sangat rendah (<1 kg/kapita per tahun).

6. Sayuran

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel VI.B.6 komoditas pangan kelompok sayuran yang tingkat ketersediaannya paling besar adalah cabai yaitu sekitar 30.217,9 ton (11,5 kg/kapita). Komoditas sayuran lain yang memiliki tingkat ketersediaan yang relatif lebih

signifikan dibandingkan sayuran lainnya adalah sawi sekitar 19.133,9 (7,3 kg/kapita), bawang merah sekitar 17.812,4 ton (6,8 kg/kapita), kangkung sekitar 17.797,6 ton (6,8 kg/kapita), dan bayam sekitar 16.456,3 (6,3 kg/kapita).

Tabel VI.B.6. Rata-Rata Ketersediaan Pangan Kelompok Sayuran Untuk Konsumsi Penduduk Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi

No	Jenis Pangan	Penyediaan (Ton/Tahun)	Ketersediaan (Ton/Tahun)		Ketersediaan Per Kapita	
			Non Konsumsi	Konsumsi	Kg/Tahun	Gram/Hari
1.	Bawang Merah	21.818,2	4.005,8	17.812,4	6,8	18,6
2.	Bawang Putih	14.334,0	2.489,8	11.844,2	4,5	12,4
3.	Ketimun	12.693,6	1.674,3	11.019,3	4,2	11,5
4.	Kacang Panjang	9.654,7	1.271,5	8.383,2	3,2	8,7
5.	Tomat	1.183,5	228,1	955,4	0,4	1,0
6.	C a b a i	35.986,6	5.768,6	30.217,9	11,5	31,5
7.	Terung	8.682,1	1.150,4	7.531,7	2,9	7,9
8.	Sawi	21.857,3	2.723,4	19.133,9	7,3	20,0
9.	Kangkung	20.494,7	2.697,1	17.797,6	6,8	18,6
10.	Labu siam	10.269,9	1.352,5	8.917,3	3,4	9,3
11.	Buncis	7.849,1	1.033,7	6.815,4	2,6	7,1
12.	Bayam	19.479,5	3.023,2	16.456,3	6,3	17,2
13.	Sayuran lainnya	6.696,1	1.027,2	5.668,9	2,2	5,9

Sementara untuk komoditas sayuran lain seperti ketimun, kacang panjang, terung, labu siam, buncis, bayam, dan sayuran lainnya memiliki tingkat ketersediaan yang relatif lebih kecil. Tomat adalah komoditas sayur yang memiliki tingkat ketersediaan paling rendah yaitu sekitar 955,4 ton (0.4 kg/kapita) per tahun. Kondisi tersebut di atas sudah barang tentu akan mempengaruhi kualitas ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk di wilayah Kota Bekasi, mengingat pentingnya kelompok pangan sayur-sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral. Mengenai keterkaitannya dengan kualitas ketersediaan pangan tersebut akan dibahas secara lebih terperinci pada sub-bab selanjutnya tentang analisis kualitas tingkat ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk di wilayah Kota Bekasi berdasarkan Neraca Bahan Makanan dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH).

7. Daging

Pangan kelompok daging merupakan sumber protein hewani utama selain ikan, sehingga tingkat ketersediaannya akan sangat berpengaruh terhadap tingkat ketersediaan protein mapun kualitas ketersediaan pangan di suatu wilayah. Data ketersediaan pangan wilayah untuk kelompok

daging di wilayah Kota Bekasi berdasarkan hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi disajikan pada Tabel VI.B.7.

Tabel VI.B.7. Rata-Rata Ketersediaan Pangan Kelompok Sayuran Untuk Konsumsi Penduduk Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi

No	Jenis Pangan	Penyediaan (Ton/Tahun)	Ketersediaan (Ton/Tahun)		Ketersediaan Per Kapita	
			Non Konsumsi	Konsumsi	Kg/Tahun	Gram/Hari
1.	Daging Sapi	4.994,0	549,3	4.444,7	1,7	4,6
2.	Daging Kerbau	19,8	2,2	17,6	0,0	0,0
3.	Daging Kambing	3.831,1	421,4	3.409,7	1,3	3,6
4.	Daging Domba	3.041,4	334,6	2.706,8	1,0	2,8
5.	Ayam Buras	2.384,2	262,3	2.122,0	0,8	2,2
6.	Ayam Ras	44.256,1	4.868,2	39.387,9	15,0	41,1
7.	Daging Itik	216,7	23,8	192,9	0,1	0,2
8.	Jeroan Ternak	1.905,1	209,6	1.695,5	0,6	1,8

Sejalan dengan total penyediaan pangan komoditas kelompok daging maka daging ayam ras merupakan jenis komoditas kelompok daging yang memiliki tingkat ketersediaan yang paling tinggi dibandingkan jenis komoditas daging lainnya di Kota Bekasi, dimana tingkat ketersediaannya pada tahun 2024 mencapai sekitar 39.387,9 ton atau rata-rata sekitar 15,0 kg/kapita per tahun, sedangkan untuk daging unggas lainnya ketersediaannya masih relatif rendah (<1 kg/kapita) per tahun. Sementara itu, ketersediaan daging ruminansia relatif lebih kecil ketersediaannya dibandingkan dengan daging unggas. Daging ruminansia yang memiliki tingkat ketersediaan yang relatif signifikan adalah daging sapi (1,7 kg/kapita), daging kambing (1,3 kg/kapita), dan daging domba (1.0 kg/kapita).

8. *Telur*

Dari 3 jenis pangan utama kelompok telur, berdasarkan data hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi maka telur ayam di wilayah Kota Bekasi, khususnya telur ayam, baik telur ayam ras maupun telur ayam buras, memiliki tingkat ketersediaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan telur itik. Data yang disajikan pada Tabel VI.B.8 menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan telur ayam ras untuk konsumsi penduduk di wilayah Kota Bekasi pada tahun 2024 mencapai sekitar 28.934,5 ton (11,0 kg/kapita) dan telur ayam buras yang mencapai sekitar 3.108,1 ton (1,2 kg/kapita) per tahun. Sementara itu untuk telur itik tingkat ketersediaannya relatif sedikit dibandingkan telur ayam, yaitu hanya sekitar 1.408,1 ton (0,5 kg/kapita) per tahun.

Tabel VI.B.8. Rata-Rata Ketersediaan Pangan Kelompok Telur Untuk Konsumsi Penduduk Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi

No	Jenis Pangan	Penyediaan (Ton/Tahun)	Ketersediaan (Ton/Tahun)		Ketersediaan Per Kapita	
			Non Konsumsi	Konsumsi	Kg/Tahun	Gram/Hari
1.	Telur Ayam Buras	5.083,5	1.975,5	3.108,1	1,2	3,2
2.	Telur Ayam Ras	32.898,8	3.964,3	28.934,5	11,0	30,2
3.	Telur Itik	1.940,0	532,0	1.408,1	0,5	1,5

9. Susu

Berdasarkan data hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi sebagaimana disajikan pada Tabel VI.B.9. tingkat ketersediaan susu sapi segar untuk konsumsi penduduk di wilayah Kota Bekasi pada tahun 2024 hanya mencapai 33,3 ton yang berarti rata-rata ketersediannya sangat kecil sekali. Sementara untuk produk susu impor, ketersediannya mencapai sekitar 15.549,7 ton atau rata-rata sekitar 5,9 kg/kapita per tahun.

Tabel VI.B.9. Rata-Rata Ketersediaan Pangan Kelompok Susu Untuk Konsumsi Penduduk Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi

No	Jenis Pangan	Penyediaan (Ton/Tahun)	Ketersediaan (Ton/Tahun)		Ketersediaan Per Kapita	
			Non Konsumsi	Konsumsi	Kg/Tahun	Gram/Hari
1.	Susu Sapi	44,8	11,5	33,3	0,0	0,0
2.	Susu Impor	17.277,5	1.727,7	15.549,7	5,9	16,2

10. Ikan

Data ketersediaan pangan wilayah untuk kelompok ikan di wilayah Kota Bekasi berdasarkan hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi disajikan pada Tabel VI.B.10. Pangan kelompok ikan yang jumlah ketersediaannya cukup signifikan pada tahun 2024 adalah tongkol yang mencapai sekitar 16.957,4 ton (6.5 kg/kapita), ikan kembung sekitar 9.862,5 (3,8 kg/kapita), mujair sekitar 9.512,0 (3.6 kg/kapita), dan ikan lainnya sekitar 10.638,6 (4,0 kg/kapita) per tahun. Jenis produk perikanan lainnya yang memiliki tingkat ketersediaan yang relatif lebih signifikan adalah udang (2,0 kg/kapita), ikan bandeng (1,4 kg/kapita), ikan mas (1,8 kg/kapita), cumi-cumi (1,2 kg/kapita), dan teri (1,0 kg/kapita). Sementara jenis hasil perikanan lainnya seperti kakap, tenggiri, kepiting, dan kerang darah memiliki tingkat ketersediaan yang relatif lebih kecil dibandingkan jenis komoditas kelompok hasil perikanan yang telah disebutkan sebelumnya. Tingkat ketersediaan jenis-jenis hasil perikanan ikan tersebut rata-rata kurang dari 1 kg/kapita per tahun.

Tabel VI.B.10. Rata-Rata Ketersediaan Pangan Kelompok Ikan Untuk Konsumsi Penduduk Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi

No	Jenis Pangan	Penyediaan (Ton/Tahun)	Ketersediaan (Ton/Tahun)		Ketersediaan Per Kapita	
			Non Konsumsi	Konsumsi	Kg/Tahun	Gram/Hari
1.	Tongkol	19.491,2	2.533,9	16.957,4	6,5	17,7
2.	Kakap	805,3	104,7	700,6	0,3	0,7
3.	Bawal	2.569,4	334,0	2.235,4	0,9	2,3
4.	Teri	2.987,4	388,4	2.599,1	1,0	2,7
5.	Kembung	11.336,2	1.473,7	9.862,5	3,8	10,3
6.	Tenggiri	383,5	49,9	333,6	0,1	0,3
7.	Bandeng	4.222,3	548,9	3.673,4	1,4	3,8
8.	Mujair	10.933,4	1.421,3	9.512,0	3,6	9,9
9.	Ikan mas	5.464,8	710,4	4.754,4	1,8	5,0
10.	Udang	5.890,5	765,8	5.124,7	2,0	5,3
11.	Kepiting	651,9	84,8	567,2	0,2	0,6
12.	Kerang darah	1.700,8	221,1	1.479,7	0,6	1,5
13.	Cumi-cumi	3.618,3	470,4	3.147,9	1,2	3,3
14.	Lainnya	12.228,3	1.589,7	10.638,6	4,0	11,1

11. Minyak dan Lemak

Data ketersediaan pangan wilayah untuk kelompok minyak dan lemak di wilayah Kota Bekasi berdasarkan hasil perhitungan NBM tahun 2024 disajikan pada Tabel VI.B.11. Sejalan dengan total ketersediaanya, ketersediaan pangan kelompok minyak dan lemak sebagian besar dalam bentuk minyak sawit, yaitu sekitar 43.058,1 ton (16,4 kg/kapita/tahun). Sementara tingkat ketersediaan minyak kelapa lebih relatif kecil (1,2 kg/kapita/tahun) dibandingkan dengan tingkat ketersediaan minyak kelapa sawit. Sementara itu, ketersediaan kelompok lemak sangat rendah sekali dengan tingkat ketersediaan kurang dari 0,1 kg/kapita/tahun

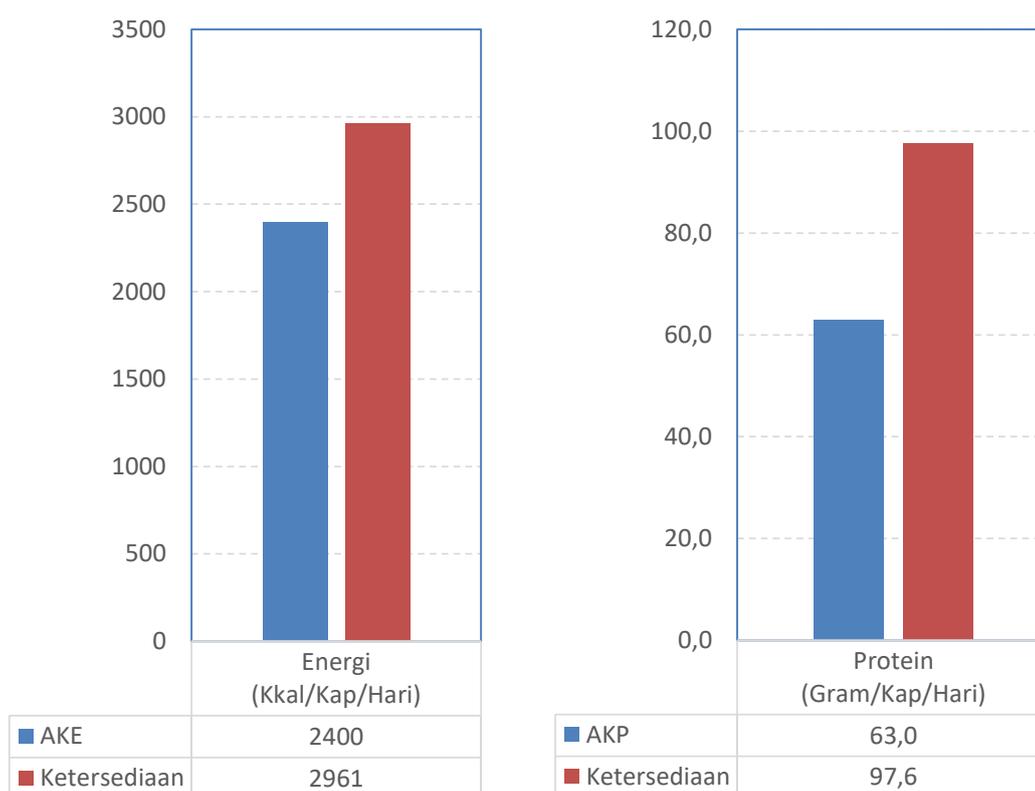
Tabel VI.B.11. Rata-Rata Ketersediaan Pangan Kelompok Minyak & Lemak Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi

No	Jenis Pangan	Penyediaan (Ton/Tahun)	Ketersediaan (Ton/Tahun)		Ketersediaan Per Kapita	
			Non Konsumsi	Konsumsi	Kg/Tahun	Gram/Hari
1.	Minyak Kelapa	3.581,4	435,5	3.145,9	1,2	3,3
2.	Minyak Sawit	49.013,2	5.955,1	43.058,1	16,4	44,9
3.	Lemak Sapi	122,7	14,1	108,6	0,0	0,1
4.	Lemak Kerbau	0,5	0,1	0,4	0,0	0,0
5.	Lemak Kambing	100,4	11,0	89,4	0,0	0,1
6.	Lemak Domba	81,9	10,1	71,8	0,0	0,1

VII. KUALITAS KETERSEDIAAN PANGAN

A. Ketersediaan Energi dan Protein

Hasil analisis ketersediaan pangan berdasarkan data Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi Tahun 2024, secara umum menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan pangan di wilayah Kota Bekasi telah melebihi Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan pada tingkat ketersediaan. Data yang disajikan pada Gambar VII.A.1 menunjukkan bahwa rata-rata ketersediaan energi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk di wilayah Kota Bekasi pada tahun 2024 adalah sekitar 2,899 kkal/kapita/hari.



Gambar VII.A.1. Ketersediaan Energi dan Protein Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi

Jika dibandingkan dengan Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan secara nasional berarti Tingkat Ketersediaan Energi (TKE) di wilayah Kota Bekasi telah mencapai sekitar 120.8 %AKE pada tahun 2024. Sementara itu, ketersediaan protein telah mencapai sebesar 94.0 gram/kapita/hari sehingga Tingkat Ketersediaan Protein (TKP) di wilayah Kota Bekasi telah mencapai 151.6 %AKP. Tingkat kecukupan ketersediaan Energi dan Protein untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk berdasarkan Neraca Bahan Makanan di wilayah Kota Bekasi pada tahun 2024 pangan juga disajikan pada Tabel VII.A.1.

Tabel VII.A.1. Tingkat Kecukupan Ketersediaan Energi dan Protein Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi

No	Komponen Gizi	Tingkat Kecukupan Ketersediaan		
		Ketersediaan	Kecukupan	%AKG
1.	Energi (kkal/kapita/hari)	2.961	2.400	123,4
2.	Protein (gram/kapita/hari)	97,6	62,0	157,4

Meskipun secara kuantitas tingkat ketersediaan pangan di wilayah Kota Bekasi telah melebihi angka kecukupan gizi yang yang dianjurkan, namun perlu dikaji lebih mendalam kualitasnya berdasarkan kontribusi energi masing-masing kelompok pangan maupun berdasarkan skor Pola Pangan Harapan. Secara umum, data yang disajikan pada Tabel VII.A.2 menunjukkan bahwa kelompok pangan padi-padian masih menjadi penyumbang energi terbesar terhadap ketersediaan pangan di wilayah Kota Bekasi. Pada tahun 2024, sekitar 1.734 kkal energi (72.2 %AKE) bersumber dari pangan kelompok padi-padian.

Tabel VII.A.2. Jumlah dan Kontribusi Ketersediaan Energi dan Protein Menurut Kelompok Pangan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi

No	Kelompok Pangan	Ketersediaan Energi Per Hari		Ketersediaan Protein Per Hari	
		Kkal/Kap	% AKE*)	Gram/Kap	% AKP**)
1.	Padi-padian	1.734	72,2	43,2	69,7
2.	Umbi-umbian	82	3,4	0,7	1,2
3.	Pangan Hewani	307	12,8	32,1	51,8
4.	Minyak dan Lemak	434	18,1	0,0	0,1
5.	Buah/Biji Berminyak	3	0,1	0,0	0,0
6.	Kacang-kacangan	163	6,8	16,9	27,2
7.	Gula	92	3,9	0,0	0,1
8.	Sayur dan Buah	146	6,1	4,6	7,4
9.	Lain-lain	-	0,0	-	0,0
Total		2.961	123,4	97,6	157,4

Keterangan : *) Standar Angka Kecukupan Energi (AKE) = 2.400 kkal/kapita/hari;

**) Standar Angka Kecukupan Protein (AKP) = 62 gram/kapita/hari

Penyumbang ketersediaan energi lainnya yang cukup signifikan kontribusinya adalah kelompok minyak dan lemak, dan pangan hewani dimana pada tahun 2024 kontribusi energi untuk masing-masing kelompok pangan tersebut berturut-turut mencapai sekitar 434 kkal (18,1 %AKE), dan 307 kkal (12,8 %AKE). Sementara itu, kelompok pangan seperti umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta dan lain-lain hanya menyumbang masing-masing kurang dari 10% terhadap total ketersediaan energi.

Sementara itu, kelompok pangan pangan hewani dan padi-padian merupakan penyumbang terbesar terhadap ketersediaan protein di wilayah Kota Bekasi. Pada tahun 2024, sebagian besar protein yang tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk di Kota Bekasi bersumber dari kelompok padi-padian yaitu sekitar 43,2 gram protein (68.6 %AKP) dan kelompok pangan hewani sekitar 32,1 gram protein (50,5 %AKP). Penyumbang ketersediaan protein lainnya yang cukup signifikan kontribusinya adalah kacang-kacangan yaitu sekitar 16,9 gram (26.8 %AKP). Sementara itu, kelompok pangan lainnya seperti kelompok umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, gula, sayur dan buah serta pangan lain-lain kontribusinya relatif kecil dimana hanya menyumbang masing-masing kurang dari 10% AKP.

B. Skor Pola Pangan Harapan

Berbagai situasi ketersediaan pangan penduduk di suatu wilayah belum cukup jika hanya ditunjukkan oleh kuantitas ketersediaan pangan. Oleh karena itu, perlu analisis lebih lanjut terhadap aspek kualitas ketersediaannya, khususnya dinilai dari aspek komposisi atau keragaman dan mutu gizi pangan yang tersedia untuk dikonsumsi. Data yang disajikan pada Tabel VII.C.3 menyajikan gambaran tentang tingkat dan gap kecukupan ketersediaan masing-masing kelompok pangan terhadap Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan secara nasional untuk tingkat ketersediaan sebesar 2.400 kkal/kapita/hari.

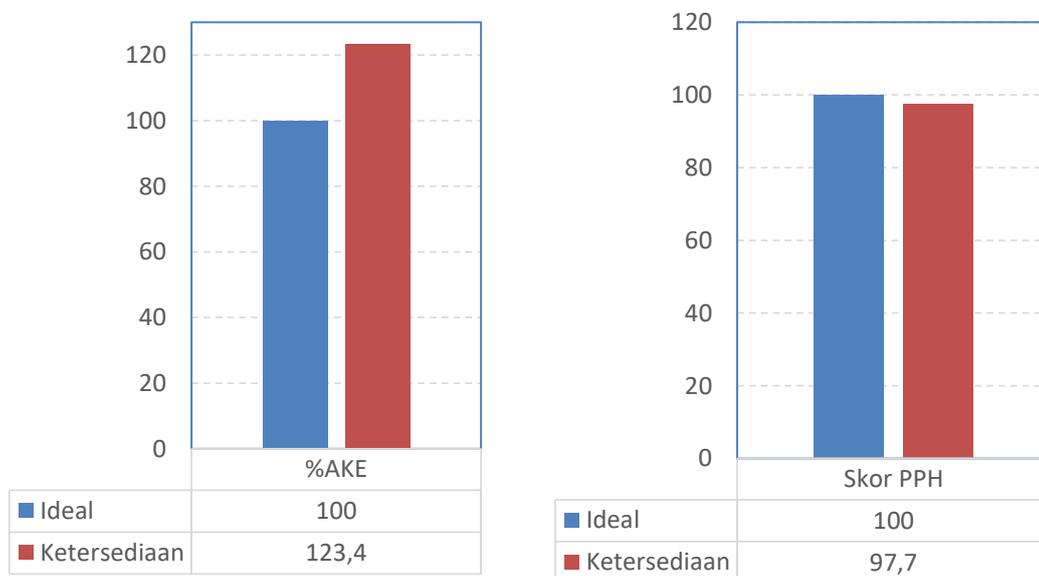
Tabel VII.B.1. Jumlah, Kontribusi dan Gap Ketersediaan Energi Menurut Kelompok Pangan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi

No	Kelompok Pangan	Kkal/kapita/hari		%AKE		Gap Ketersediaan	
		Aktual	Standar	Aktual	Standar	Kkal	%AKE
1.	Padi-padian	1.734	1.200	72,2	50,0	534	22,2
2.	Umbi-umbian	82	144	3,4	6,0	-62	-2,6
3.	Pangan Hewani	307	288	12,8	12,0	19	0,8
4.	Minyak & Lemak	434	240	18,1	10,0	194	8,1
5.	Buah/Biji Berminyak	3	72	0,1	3,0	-69	-2,9
6.	Kacang-kacangan	163	120	6,8	5,0	43	1,8
7.	Gula	92	120	3,9	5,0	-28	-1,1
8.	Sayur dan Buah	146	144	6,1	6,0	2	0,1
9.	Lain-lain	-	72	0,0	3,0	-72	-3,0
Total		2.961	2.400	123,4	100,0	561	23,4

Keterangan : *) Angka Kecukupan Energi (AKE) = 2.400 Kkal/kapita/hari

Berdasarkan standar PPH Nasional, kontribusi energi terhadap Angka Kecukupan Energi (AKE) yang ideal untuk masing-masing kelompok pangan adalah sebagai berikut : 50% padi-padian, 6% umbi-umbian, 12% pangan hewani, 10% minyak dan lemak, 3%

buah/biji berminyak, 5% kacang-kacangan, 5% gula, 6% sayur dan buah, dan 4% lain-lain. Jika dibandingkan dengan standar PPH tersebut maka sudah dapat dipastikan terdapat kelompok pangan yang tingkat ketersediaannya jauh melebihi angka yang dianjurkan dan terdapat pula kelompok pangan yang tingkat ketersediaannya masih kurang dari angka yang dianjurkan. Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel VII.B.1. Kelompok pangan yang ketersediaannya telah melebihi angka kecukupannya adalah pangan kelompok padi-padian (lebih 534 kkal atau 22,3 %AKE), pangan hewani (lebih 19 kkal atau 0,8 %AKE, minyak dan lemak (lebih 194 kkal atau 8,1 %AKE), dan kacang-kacangan (lebih 43 kkal atau 1.8 %AKE). Namun demikian, masih terdapat juga kelompok pangan yang kontribusi ketersediaan energinya masih belum mencapai angka yang dianjurkan untuk masing-masing kelompoknya. Adapun kelompok pangan yang ketersediaan energinya masih dibawah angka kecukupan yang dianjurkan adalah umbi-umbian, buah/biji berminyak, gula, serta lain-lain dimana masih terdapat kekurangan masing-masing sekitar 62 kkal, 69 kkal, 28 kkal, dan 72 kkal per kapita/hari.



Gambar VII.B.1. Tingkat Kecukupan Energi dan dan Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi.

Secara umum, hasil analisis kualitas ketersediaan pangan menunjukkan bahwa meskipun kuantitas ketersediaan pangan berdasarkan tingkat ketersediaan energi dan protein di wilayah Kota Bekasi telah melebihi angka kecukupan yang dianjurkan, kualitas ketersediaan pangannya belum mencapai pola pangan ideal. Sebagaimana disajikan pada gambar VII.B.1. skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan di wilayah di Kota Bekasi pada tahun 2024 baru mencapai 97.7 atau kurang 2,3 poin dari skor PPH ideal 100.

Tabel VII.B.2. Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan Wilayah Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Kapita/Hari		Standar PPH**)		Capaian	
		kcal	%AKE*)	Bobot	Skor	Skor AKE	Skor PPH
1.	Padi-padian	1.734	72,2	0,5	25,0	36,1	25,0
2.	Umbi-umbian	82	3,4	0,5	2,5	1,7	1,7
3.	Pangan Hewani	307	12,8	2,0	24,0	25,6	24,0
4.	Minyak dan Lemak	434	18,1	0,5	5,0	9,0	5,0
5.	Buah/Biji Berminyak	3	0,1	0,5	1,0	0,1	0,1
6.	Kacang-kacangan	163	6,8	2,0	10,0	13,6	10,0
7.	Gula	92	3,9	0,5	2,5	1,9	1,9
8.	Sayur dan Buah	146	6,1	5,0	30,0	30,4	30,0
9.	Lain-lain	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total		2.961	123,4		100,0		97,7

Keterangan : *) Angka Kecukupan Energi (AKE) = 2.400 Kkal/kapita/hari; **) Standar Nasional

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel VII.B.2 terlihat bahwa sejalan dengan hasil analisis kualitas ketersediaan pangan berdasarkan kontribusi energi dari masing-masing kelompok pangan terhadap AKE, maka sebagian kelompok pangan telah mencapai atau bahkan melebihi skor PPH maksimal yang harus dicapai, sementara skor PPH kelompok pangan lainnya masih dibawah skor ideal. Kelompok pangan yang sudah mencapai skor PPH maksimal yang harus dicapai adalah kelompok padi-padian, pangan hewani, minyak dan lemak, serta kacang-kacangan. Sementara kelompok pangan yang belum mencapai skor PPH maksimal adalah kelompok kelompok umbi-umbian, buah/biji berminyak, gula, dan kelompok lainnya.

VIII. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi tahun 2024, Sebagian besar pangan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk di wilayah Kota Bekasi diperoleh dari pasokan dari luar daerah. Estimasi volume total penyediaan pangan di wilayah Kota Bekasi tahun 2024 mencapai lebih dari 1,358,131 ton yang sebagian besar penyediaannya tergantung pasokan dari luar wilayah (97,3%). Jenis pangan yang penyediaannya dari hasil produksi wilayah Kota Bekasi yang cukup signifikan antara lain beras giling (766,8 ton), ubi kayu (229,5 ton), pisang (2.667,8 ton), pepaya (2.600,8 ton), jambu (2.033,1 ton), bayam (2.242,8 ton), daging sapi (3.271,7 ton), dan daging kambing (2.509,8 ton).

Beras giling merupakan jenis pangan kelompok padi-padian yang paling dominan penyediaannya dengan total ketersediaan mencapai 388.028,1 ton (147,7 kg/kapita) per tahun. Ubi kayu adalah kelompok komoditas makanan berpati yang paling dominan ketersediaannya yaitu sekitar 41.759,3 ton (15,9 kg/kapita) per tahun. Ketersediaan gula pasir mencapai 21.697,8 ton (8,3 kg/kapita) per tahun. Sementara itu, ketersediaan pangan kelompok buah/biji berminyak yang paling dominan adalah kacang kedelai yang mencapai sekitar 38,956,5 ton (114,8 kg/kapita) per tahun. Rata-rata ketersediaan pangan kelompok buah-buahan yang paling banyak ketersediaannya adalah jeruk (29.907,1 ton atau sekitar 11,4 kg/kapita). Adapun komoditas pangan kelompok sayuran yang tingkat ketersediaannya paling tinggi adalah cabai yaitu sekitar 30.217,9 ton (11,5 kg/kapita).

Sementara itu, komoditas pangan utama kelompok pangan hewani dengan tingkat ketersediaan paling tinggi di Kota Bekasi adalah daging ayam ras yaitu sekitar 39.387,9 ton (15,0 kg/kapita) per tahun. Tingkat ketersediaan telur ayam ras untuk konsumsi penduduk di wilayah Kota Bekasi pada tahun 2024 mencapai sekitar 28.934,5 ton (11,0 kg/kapita). Sementara itu, produk susu impor ketersediaannya mencapai 15.549,7 ton atau rata-rata sekitar 5,9 kg/kapita per tahun. Pangan kelompok ikan yang tingkat ketersediaannya paling tinggi pada tahun 2024 adalah ikan tongkol yang mencapai sekitar 16.957,4 ton (6,5 kg/kapita). Ketersediaan pangan kelompok minyak dan lemak sebagian besar dalam bentuk minyak sawit, yaitu sekitar 43.058,1 (16,4 kg/kapita) per tahun. Sementara tingkat ketersediaan minyak kelapa dan lemak relatif kecil dibandingkan dengan tingkat ketersediaan minyak kelapa sawit.

Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata tingkat ketersediaan energi untuk memenuhi kebutuhan penduduk di Kota Bekasi pada tahun 2024 adalah sekitar 2,961 kkal/kapita/hari. Jika dibandingkan dengan Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan secara nasional berarti Tingkat Ketersediaan Energi (TKE) di Kota Bekasi mencapai sekitar 123,4 %AKE pada tahun 2024. Sementara itu, ketersediaan protein mencapai sebesar 97,6

gram/kapita/hari sehingga Tingkat Ketersediaan Protein (TKP) di Kota Bekasi telah mencapai 157,4 %AKP.

Kelompok pangan padi-padian merupakan penyumbang energi terbesar ketersediaan pangan di wilayah Kota Bekasi yang mencapai sekitar 1.734 kkal energi (72,2 %AKE) Penyumbang ketersediaan energi lainnya yang cukup signifikan kontribusinya adalah kelompok minyak dan lemak, dan kelompok pangan hewani dimana pada tahun 2024 kontribusi energi masing-masing kelompok pangan tersebut berturut-turut mencapai sekitar 434 kkal (18,1 %AKE), dan 307 (12,8 %AKE). Sejalan dengan ketersediaan energinya, kelompok pangan padi-padian dan pangan hewani merupakan penyumbang terbesar terhadap ketersediaan protein di wilayah Kota Bekasi. Pada tahun 2024, sebagian besar protein yang tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk di Kota Bekasi bersumber dari kelompok padi-padian yaitu sekitar 43,2 gram protein (68.6 %AKP) dan kelompok pangan hewani sekitar 32,1 gram protein (51.0 %AKP). Penyumbang ketersediaan protein lainnya yang cukup signifikan kontribusinya adalah kacang-kacangan yaitu sekitar 16,9 gram (26.8 %AKP).

Kelompok pangan yang ketersediaannya telah melebihi angka kecukupannya adalah pangan kelompok padi-padian (lebih 534 kkal atau 22,3 %AKE), pangan hewani (lebih 19 kkal atau 0,8 %AKE, minyak dan lemak (lebih 194 kkal atau 8,1 %AKE), dan kacang-kacangan (lebih 43 kkal atau 1.8 %AKE). Namun demikian, masih terdapat juga kelompok pangan yang kontribusi ketersediaan energinya masih belum mencapai angka yang dianjurkan untuk masing-masing kelompoknya. Adapun kelompok pangan yang ketersediaan energinya masih dibawah angka kecukupan yang dianjurkan adalah umbi-umbian, buah/biji berminyak, gula, serta lain-lain dimana masih terdapat kekurangan masing-masing sekitar 62 kkal, 69 kkal, 28 kkal, dan 72 kkal per kapita/hari. Secara umum, hasil analisis kualitas ketersediaan pangan di wilayah Kota Bekasi menunjukkan bahwa meskipun kuantitas ketersediaan pangan berdasarkan tingkat ketersediaan energi dan protein di wilayah Kota Bekasi telah melebihi angka kecukupan yang dianjurkan, kualitas ketersediaannya belum mencapai pola pangan ideal. Hal tersebut ditunjukkan dengan capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan di wilayah di Kota Bekasi pada tahun 2024 yang baru mencapai 97.7 atau kurang 2,3 poin dari skor PPH ideal 100.

B. Saran

Situasi penyediaan pangan yang tinggi di suatu wilayah belum menjadi jaminan tercukupinya ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduknya. Pengelolaan, distribusi dan penggunaan pangan di suatu wilayah sampai siap dikonsumsi oleh masyarakat sangat menentukan tingkat ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Selain itu, tingkat ketersediaan pangan yang tinggi secara kuantitas juga tidak menjadi jaminan baiknya kualitas ketersediaan

pangan untuk kebutuhan konsumsi penduduk. Oleh karena itu, selain penguatan kebijakan yang mengatur tata kelola pasokan pangan di wilayah Kota Bekasi, berbagai upaya efisiensi penggunaan pangan untuk kebutuhan non-makanan perlu terus ditingkatkan.

Selain mempertahankan kuantitas tingkat ketersediaan sudah dicapai, ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk di wilayah Kota Bekasi masih perlu ditingkatkan kualitasnya agar lebih beragam dan bergizi seimbang sesuai dengan Pola Pangan Harapan. Komoditas pangan yang masih perlu ditingkatkan jumlah dan kontribusinya adalah kelompok umbi-umbian, buah/biji berminyak, serta sayur dan buah. Jika dikaitkan dengan ketergantungan wilayah terhadap pangan impor untuk kelompok komoditas tersebut yang sedikit lebih rendah dibandingkan kelompok lainnya, khususnya kelompok umbi-umbian dan kacang-kacangan, maka peningkatan ketersediaan kelompok pangan tersebut masih dimungkinkan.

Upaya peningkatan penyediaan pangan yang bersumber dari produksi merupakan alternatif strategis yang dapat ditempuh di wilayah Kota Bekasi, mengingat masih cukup tingginya potensi sumberdaya alam untuk pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan di wilayah Kota Bekasi. Program intensifikasi melalui penguatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana produksi pangan diharapkan dapat meningkatkan hasil produksi pertanian tanaman pangan, peternakan dan budidaya perikanan. Diharapkan akan dapat menambah ketersediaan pangan untuk kebutuhan konsumsi penduduk.

Masih sangat tingginya tingkat ketergantungan ketersediaan energi terhadap pangan kelompok padi-padian, khususnya tepung terigu, dan juga kelompok susu akan menjadi beban perekonomian yang cukup berat bagi wilayah Kota Bekasi dalam upaya penyediaan pangan, karena tingkat ketergantungan untuk kelompok pangan tersebut sangat tinggi. Pengadaan pangan melalui impor dari wilayah lain atau bahkan luar negeri menjadi suatu keharusan yang tidak dapat dihindari untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk di wilayah Kota Bekasi. Oleh karena itu, kebijakan dan program yang terkait dengan penyediaan, pemasaran, dan distribusi pangan di dalam maupun dari dan ke luar wilayah Kota Bekasi harus mendapat perhatian yang serius untuk meningkatkan dan mempertahankan kestabilan ketersediaan pangan wilayah di Kota Bekasi.

Melalui program penguatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana penyimpanan dan distribusi pangan diharapkan dapat menekan tingkat kehilangan pangan akibat tercecer dan rusak selama penyimpanan dan pendistribusian, sehingga sedikit banyak akan meningkatkan ketersediaan pangan untuk kebutuhan konsumsi. Tingkat ketergantungan yang tinggi suatu wilayah terhadap pangan impor secara konseptual tidak menjadi masalah asalkan : (1) PAD yang digunakan untuk mengimpor cukup memadai, (2) analisis secara teknis dan ekonomis untuk wilayah tersebut lebih baik impor daripada produksi, dan (3) ketersediaan pangan tersebut di pasar

regional atau nasional terjamin. Untuk kasus Kota Bekasi, ketergantungan pangan terhadap impor nampaknya bukan menjadi masalah utama. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa (1) secara teknis dan ekonomis wilayah Kota Bekasi kurang layak untuk melakukan kegiatan produksi pangan, khususnya komoditas pangan dimana lahan pertanian menjadi faktor utama produksi (2) sumberdaya atau pendapatan daerah yang tersedia untuk mengimpor pangan relatif memadai, dan (3) kebutuhan pangan di wilayah Kota Bekasi sebagai permintaan pasar bagi wilayah-wilayah lain yang menjadi sentra produksi pangan merupakan potensi investasi daerah di bidang agribisnis.

Strategi lain yang dapat ditempuh adalah dengan perbaikan pola konsumsi pangan masyarakat agar secara bertahap dapat menyesuaikan dengan standar PPH yang dianjurkan. Sejalan dengan perbaikan pola konsumsi, maka penyediaan kelompok pangan yang tingkat ketersediaannya sudah jauh melebihi angka yang dianjurkan dapat diturunkan secara bertahap pula. Namun demikian, penurunan ketersediaan kelompok pangan tersebut harus pula diimbangi pula dengan peningkatan ketersediaan pangan kelompok yang kontribusinya masih rendah, khususnya untuk kelompok umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, serta buah dan sayur-sayuran.

Hasil analisis situasi penyediaan dan tingkat ketersediaan pangan wilayah berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi Tahun 2004 yang telah disusun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan ketahanan pangan, khususnya bidang ketersediaan pangan, di Kota Bekasi di masa yang akan datang. Agar data dan informasi yang disajikan melalui analisis tersebut memiliki relevansi dan akurasi yang memadai untuk penyusunan kebijakan dan perencanaan program ketahanan pangan di Kota Bekasi, maka kegiatan analisis harus dilaksanakan secara reguler dan lebih komprehensif setiap tahunnya.

Selain itu, untuk meningkatkan tingkat akurasi hasil analisis dan kesesuaiannya dengan situasi dan potensi wilayah Kota Bekasi, maka perlu dilakukan kajian secara khusus berbagai faktor konversi dan standar acuan yang digunakan dalam perhitungan dan analisis. Berbagai faktor konversi input dan output serta faktor koreksi tercecer serta penggunaan pangan untuk pakan dan industri non pangan dan lain-lain perlu didata dan dianalisis secara empirik sesuai dengan kondisi wilayah Kota Bekasi.

Agar hasil kajian tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan sasaran ketersediaan pangan penduduk di wilayah Kota Bekasi dimasa mendatang, maka perlu dilakukan analisis situasi yang paling tidak mencakup data periode terakhir RPJMD Kota Bekasi. Dengan demikian dapat dilakukan analisis tren pertumbuhan pada indikator pokok situasi ketersediaan pangan. Hasil analisis tren pertumbuhan tersebut merupakan salah satu

faktor utama yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam analisis sasaran ketersediaan pangan periode RPJMD berikutnya.

Mengingat saat ini merupakan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045, maka diperlukan pula kajian lebih komprehensif untuk menyusun naskah akademik roadmap pengembangan ketersediaan pangan di Kota Bekasi tahun 2025-2045. Oleh karena itu perlu dilengkapi dengan kajian mendalam tentang rantai pasokan pangan serta tingkat efisiensi penggunaan pangan yang mencakup tingkat *food lost* dan *food waste* pangan di wilayah Kota Bekasi. Dengan demikian, diharapkan dapat disusun berbagai strategi dan alternatif program ketahanan pangan di bidang ketersediaan pangan di wilayah Kota Bekasi yang lebih efektif dan efisien di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pangan Nasional, 2025. Panduan Penyusunan Neraca Bahan Makanan. Direktorat Ketersediaan Pangan, Badan Pangan Nasional. Jakarta.
- Badan Pangan Nasional, 2024. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pola Pangan Harapan. Badan Pangan Nasional. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2025. Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2025. Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, Bekasi.
- Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2025. Pola Konsumsi Penduduk Jawa Barat Tahun 2024, Volume 13, 2025. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Bandung.
- Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2024. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bekasi Tahun 2024. Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, Bekasi.
- Pemerintah Kota Bekasi, 2021. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2021-2026. Pemerintah Kota Bekasi. Bekasi.
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi. 2022. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2021-2026. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi. Bekasi.
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi. 2025. Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2024. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi. Bekasi.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Perhitungan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi

Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2024
Mid Year Population 2.145.400 Jiwa

Jenis Bahan Makanan <i>Commodity</i>	Produksi <i>Production</i>		Perubahan Stok <i>Changes in Stock</i>	Penyediaan <i>Provincial Supply</i>			Pemakaian dalam kabupaten/kota <i>Regional Utilization</i>							Ketersediaan untuk konsumsi per kapita <i>Per Capita Consumption Availability</i>						
	(Ton)			Impor <i>Imports</i>	Ekspor <i>Exports</i>	Provinsi <i>Supply Available before Export</i>	(Ton)							kg/tn <i>kg/year</i>	gram/hari <i>gram/day</i>	Energi <i>cal/day</i>	Protein <i>Proteins gram/day</i>	Lemak <i>Fats gram/day</i>		
	Masukan <i>Input</i>	Keluaran <i>Output</i>	Pakan <i>Feed</i>				Bibit <i>Seed</i>	Diolah untuk <i>Manufacture for</i>		Yang Tercecer <i>Waste</i>	Penggunaan Lain <i>Others</i>	Bahan Makanan <i>Food</i>								
				Makanan <i>Food</i>	Bukan Makanan <i>Non Food</i>															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
I . PADI-PADIAN /CEREALS																				
1 . Padi garing Kering /Dry stalk paddy /unhusked rice	-	1.370,7	0,0	0,0	1.370,7	0,0	1.370,7	68,5	27,4	1.211,7	0,0	63,1	0,0	0,00	-	-	-	-		
2 . Gabah Krg Giling / Beras/ Unhusked rice / Rice	1.211,7	776,8	0,0	442.937,5	443.714,3	0,0	443.714,3	221,9	0,0	0,0	0,0	11.092,9	44.371,4	388.028,12	146,75	402	1.459,5	35,8	5,6	
3 . Jagung /Maize	33,5	24,8	0,0	740,0	764,8	0,0	764,8	10,7	19,1	0,0	0,0	35,2	76,5	623,28	0,24	1	2,1	0,1	0,0	
4 . Jagung basah/Fresh Maize	62,2	159,6	0,0	0,0	159,6	0,0	159,6	0,0	4,0	33,5	0,0	7,5	16,0	98,63	0,04	0	0,0	0,0	0,0	
5 . Gandum/Wheat	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-	-	-	-	-	
6 . Tepung gandum/ Wheat Flour	0,0	0,0	0,0	87.682,9	87.682,9	0,0	87.682,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.768,3	78.914,61	29,85	82	272,3	7,4	0,8	
																1.733,9	43,2	6,5		
II . MAKANAN BERPATI /STARCHY FOOD																				
1 . Ubi Jalar / Sweet potatoes	-	0,0	0,0	12.412,4	12.412,4	0,0	12.412,4	248,2	0,0	0,0	0,0	1.241,2	1.241,2	9.681,69	3,66	10	12,6	0,1	0,0	
2 . Ubi Kayu/Cassava	-	229,5	0,0	64.015,5	64.245,0	0,0	64.245,0	1.284,9	0,0	6.424,5	0,0	8.351,9	6.424,5	41.759,25	15,79	43	56,6	0,4	0,1	
3 . Ubi kayu/Gaplek/Cassava/Manise	6.424,5	2.312,8	0,0	0,0	2.312,8	0,0	2.312,8	0,0	0,0	1.156,4	0,0	0,0	231,3	925,13	0,35	1	3,2	0,0	0,0	
4 . Ubi kayu/Tapioka/Cassava/Tapioca	1.156,4	323,8	0,0	0,0	323,8	0,0	323,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4	291,42	0,11	0	1,1	0,0	0,0	
5 . Sagu /Tepang Sagu/ Sagopith / Sago flour	-	0,0	0,0	920,0	920,0	0,0	920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0	828,04	0,31	1	1,8	0,0	0,0	
																	75,3	0,5	0,2	
III . G U L A / S U G A R																				
1 . Gula Pasir / Refined Sugar	-	0,0	0,0	24.396,0	24.396,0	0,0	24.396,0	0,0	0,0	0,0	19,5	239,1	2.439,6	21.697,82	8,21	22	81,8	-	-	
2 . Gula merah/Brown sugar	-	0,0	0,0	3.071,5	3.071,5	0,0	3.071,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	307,2	2.764,38	1,05	3	10,6	0,0	0,1	
																	92,4	0,0	0,1	
IV . BUAH/BLI BERMINYAK /PULSES NUT DAN OIL SEEDS																				
1 . Kacang Tanah Berkulit /Groundnuts in shell	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-	-	-	-	-	
2 . Kacang Tanah Lepas Kulit /Groundnuts in shelled	0,0	0,0	0,0	1.265,0	1.265,0	0,0	1.265,0	0,0	0,0	107,6	0,0	63,2	126,5	967,56	0,37	1	4,5	0,3	0,4	
3 . Kedelai /Soyabeans	-	0,0	0,0	47.128,6	47.128,6	0,0	47.128,6	160,2	942,6	0,0	0,0	2.356,4	4.712,9	38.956,48	14,73	40	153,8	16,3	6,7	
4 . Kacang Hijau /Greenpeas	-	0,0	0,0	1.723,3	1.723,3	0,0	1.723,3	34,5	0,0	0,0	0,0	86,2	172,3	1.430,32	0,54	1	5,0	0,3	0,0	
5 . Kelapa Berkulit /daging /Coconut in husk /Coconut meat	0,0	0,0	0,0	4.160,5	4.160,5	0,0	4.160,5	0,0	2,1	2.210,0	0,0	151,9	416,0	1.380,45	0,52	1	2,7	0,0	0,3	
6 . Kelapa Daging / Kopra/ Coconut meat / Copra	2.210,0	994,5	0,0	0,0	994,5	0,0	994,5	0,0	0,0	983,7	0,0	10,8	0,0	0,00	-	-	-	-	-	
																	166,0	16,9	7,5	

Jenis Bahan Makanan <i>Commodity</i>	Produksi <i>Production</i> (Ton)		Perubahan Stok <i>Changes in Stock</i>	Penyediaan Provinsi sbl.			Penyediaan Provinsi						Pemakaian dalam kabupaten/kota <i>Regencial Utilization</i> (Ton)					Ketersediaan untuk konsumsi per kapita <i>Per Capita Consumption Availability</i>				
	Masukan <i>Input</i>	Keluaran <i>Output</i>		Impor <i>Imports</i>	Ekspor <i>Exports</i>	Ekspor <i>Exports</i>	Ekspor <i>Exports</i>	Pakan <i>Feed</i>	Bibit <i>Seed</i>	Diolah untuk <i>Manufacture for</i>		Yang Tercecer <i>Waste</i>	Penggunaan Lain <i>Others</i>	Bahan Makanan <i>Food</i>	kg/tn <i>kg/year</i>	gram/hari <i>gram/day</i>	Energi <i>cal/day</i>	Protein <i>Proteins</i>	Lemak <i>Fats</i>			
			Makanan <i>Food</i>							Bukan Makanan <i>Non Food</i>	kg/year									gram/day	cal/day	gram/day
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
	V	BUAH-BUAHAN / FRUITS																				
1	-	455,3	0,0	9.496,7	9.952,0	0,0	9.952,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	995,2	8.876,17	3,36	9	4,8	0,1	0,4			
2	-	8,9	0,0	34.730,4	34.739,3	0,0	34.739,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1.358,3	3.473,9	29.907,10	11,31	31	9,7	0,2	0,0			
3	-	187,2	0,0	16.139,9	16.139,9	0,0	16.139,9	0,0	0,0	0,0	0,0	130,7	1.614,0	14.395,15	5,44	15	6,0	0,1	0,0			
4	-	171,2	0,0	9.372,1	9.543,3	0,0	9.543,3	0,0	0,0	0,0	0,0	954,3	954,3	7.634,62	2,89	8	2,3	0,0	0,1			
5	-	2.033,1	0,0	0,0	2.033,1	0,0	2.033,1	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	203,3	1.813,32	0,69	2	0,8	0,0	0,0			
6	-	1.761,3	0,0	0,0	1.761,3	0,0	1.761,3	0,0	0,0	0,0	0,0	123,3	176,1	1.461,85	0,55	2	0,6	0,0	0,0			
7	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0			
8	-	2.600,8	0,0	28.009,7	30.610,5	0,0	30.610,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1.897,9	3.061,1	25.651,60	9,70	27	9,2	0,1	-			
9	-	2.667,8	0,0	30.099,5	32.767,3	0,0	32.767,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1.540,1	3.276,7	27.950,49	10,57	29	20,8	0,2	0,1			
10	-	1.343,5	0,0	0,0	1.343,5	0,0	1.343,5	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	134,4	1.198,27	0,45	1	0,3	0,0	0,0			
11	-	0,0	0,0	14.572,0	14.572,0	0,0	14.572,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,9	1.457,2	12.993,85	4,91	13	7,1	0,1	0,0			
12	-	500,1	0,0	0,0	500,1	0,0	500,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	50,0	445,99	0,17	0	0,4	0,0	0,0			
13	-	0,0	0,0	20.393,7	20.393,7	0,0	20.393,7	0,0	0,0	0,0	0,0	169,3	2.039,4	18.185,02	6,88	19	2,4	0,0	0,0			
14	-	867,3	0,0	0,0	867,3	0,0	867,3	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	86,7	773,34	0,29	1	0,2	0,0	0,0			
15	-	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,68	0,00	0	0,0	0,0	0,0			
16	-	790,7	0,0	0,0	790,7	0,0	790,7	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	79,1	705,07	0,27	1	0,2	0,0	0,0			
17	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0			
18	-	220,1	0,0	0,0	220,1	0,0	220,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	22,0	196,26	0,07	0	0,1	0,0	0,0			
19	-	242,7	0,0	0,0	242,7	0,0	242,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	24,3	216,44	0,08	0	0,1	0,0	0,0			
20	-	0,0	0,0	10.000,4	10.000,4	0,0	10.000,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	1.000,0	8.917,35	3,37	9	4,7	0,0	0,0			
21	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0			
22	-	1.067,2	0,0	36.439,3	37.506,5	0,0	37.506,5	0,0	0,0	0,0	0,0	311,3	3.750,6	33.444,52	12,65	35	10,9	0,1	0,1			
																	80,3	1,0	0,7			
VI	SAYURAN /VEGETABLES																					
1	-	0,0	0,0	21.818,2	21.818,2	0,0	21.818,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1.824,0	2.181,8	17.812,41	6,74	18	6,5	0,3	0,0			
2	-	0,0	0,0	12.693,6	12.693,6	0,0	12.693,6	0,0	90,1	0,0	0,0	314,8	1.269,4	11.019,30	4,17	11	0,5	0,0	0,0			
3	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0			
4	-	189,0	0,0	9.654,7	9.654,7	0,0	9.654,7	0,0	42,5	0,0	0,0	263,6	965,5	8.383,20	3,17	9	2,4	0,2	0,0			
5	-	0,0	0,0	14.135,5	14.135,5	0,0	14.135,5	0,0	168,2	0,0	0,0	709,6	1.413,6	11.844,15	4,48	12	6,4	0,2	0,0			
6	-	0,0	0,0	5.018,1	5.018,1	0,0	5.018,1	0,0	0,0	0,0	0,0	280,5	501,8	4.235,74	1,60	4	0,8	0,0	0,0			
7	-	0,0	0,0	1.183,5	1.183,5	0,0	1.183,5	0,0	5,2	0,0	0,0	104,5	118,3	955,43	0,36	1	0,2	0,0	0,0			
8	-	0,0	0,0	11.278,0	11.278,0	0,0	11.278,0	0,0	0,0	0,0	0,0	277,4	1.127,8	9.872,78	3,73	10	2,9	0,1	0,0			
9	-	485,0	0,0	35.501,6	35.986,6	0,0	35.986,6	0,0	255,5	0,0	18,0	1.896,5	3.598,7	30.217,93	11,43	31	27,4	1,3	0,6			
10	-	196,0	0,0	8.486,1	8.682,1	0,0	8.682,1	0,0	63,4	0,0	0,0	218,8	868,2	7.531,68	2,85	8	2,1	0,1	0,1			
11	-	1.850,8	0,0	20.006,5	21.857,3	0,0	21.857,3	0,0	0,0	0,0	0,0	537,7	2.185,7	19.133,89	7,24	20	1,3	0,1	0,0			
12	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Jenis Bahan Makanan <i>Commodity</i>	Produksi <i>Production</i> (Ton)		Perubahan Stok <i>Changes in Stock</i>	Penyediaan Provinsi sbl.			Penyediaan Provinsi <i>Supply Available</i>	Pemakaian dalam kabupaten/kota <i>Regencial Utilization</i> (Ton)							Ketersediaan untuk konsumsi per kapita <i>Per Capita Consumption Availability</i>					
	Masukan <i>Input</i>	Keluaran <i>Output</i>		Impor <i>Imports</i>	Ekspor <i>Exports</i>	Ekspor <i>Exports</i>		Diolah untuk		Yang Terececer <i>Waste</i>	Penggunaan Lain <i>Others</i>	Bahan Makanan <i>Food</i>	kg/tn <i>kg/year</i>	gram/hari <i>gram/day</i>	Energi <i>cal/day</i>	Protein <i>Proteins gram/day</i>	Lemak <i>Fats gram/day</i>			
			Pakan <i>Feed</i>				Bibit <i>Seed</i>	Manufaktur for												
								Makanan <i>Food</i>	Bukan Makanan <i>Non Food</i>											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
13 . Kangkung / Swampcabbage	-	1970,8	0,0	18.523,9	20.494,7	0,0	20.494,7	0,0	118,9	0,0	0,0	0,0	528,8	2.049,5	17.797,56	6,73	18	3,1	0,4	0,1
14 . Lobak /Radish	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 . Labu Siam /Pumpkin	-	0,0	0,0	10.269,9	10.269,9	0,0	10.269,9	0,0	44,2	0,0	0,0	0,0	281,4	1.027,0	8.917,35	3,37	9	1,8	0,1	0,0
16 . Buncis / Greenbeans	-	0,0	0,0	7.849,1	7.849,1	0,0	7.849,1	0,0	34,5	0,0	0,0	0,0	214,3	784,9	6.815,40	2,58	7	2,2	0,2	0,0
17 . Bayam / Spinach	-	2.242,8	0,0	17.236,7	19.479,5	0,0	19.479,5	0,0	531,8	0,0	0,0	0,0	543,5	1.947,9	16.456,26	6,22	17	1,9	0,1	0,0
18 . Bawang Putih / Garlic	-	0,0	0,0	14.334,0	14.334,0	0,0	14.334,0	0,0	34,4	0,0	0,0	0,0	1.022,0	1.433,4	11.844,15	4,48	12	10,3	0,5	0,0
19 . Kembang Kol	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
20 . Jamur / Mushroom	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
21 . Melinjo /	-	646,4	0,0	0,0	646,4	0,0	646,4	0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	16,9	64,6	547,24	0,21	1	0,2	0,0	0,0
22 . Petai /	-	152,2	0,0	0,0	152,2	0,0	152,2	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	4,0	15,2	128,81	0,05	0	0,0	0,0	0,0
23 . Jengkol /	-	1,0	0,0	2.064,0	2.065,0	0,0	2.065,0	0,0	56,4	0,0	0,0	0,0	53,9	206,5	1.748,27	0,66	2	0,3	0,1	0,0
24 . Sayuran lainnya/Others	-	0,0	0,0	6.696,1	6.696,1	0,0	6.696,1	0,0	182,8	0,0	0,0	0,0	174,8	669,6	5.668,89	2,14	6	1,6	0,2	0,0
VII . DA G I N G / M E A T																	71,9	3,8	1,2	
1 . Daging Sapi / Beef Meat	4.089,6	3.271,7	0,0	1.722,3	4.994,0	0,0	4.994,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,9	499,4	4.444,68	1,68	5	9,5	0,9	0,6
2 . Daging Kerbau / Buffalo Meat	17,0	13,0	0,0	6,8	19,8	0,0	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,0	17,59	0,01	0	0,0	0,0	0,0
3 . Daging Kambing / Meat Goat	3.346,5	2.509,8	0,0	1.321,3	3.831,1	0,0	3.831,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,3	383,1	3.409,69	1,29	4	5,4	0,6	0,3
4 . Daging Domba / Mutton Meat	2.729,4	1.992,5	0,0	1.048,9	3.041,4	0,0	3.041,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,4	304,1	2.706,82	1,02	3	5,8	0,5	0,4
5 . Daging Kuda / Horse Meat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6 . Daging Babi / Pork Meat	5,9	4,7	0,0	2,5	7,2	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	6,43	0,00	0	0,0	0,0	0,0
7 . Daging Ayam Buras /Local Chicken Meat	109,8	63,7	0,0	2.320,6	2.384,2	0,0	2.384,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8	238,4	2.121,96	0,80	2	6,6	0,4	0,5
8 . Daging Ayam Ras / Improved Chicken Meat	2.037,5	1.181,8	0,0	43.074,3	44.256,1	0,0	44.256,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	442,6	4.425,6	39.387,90	14,90	41	123,3	7,4	10,2
9 . Daging Itik / Duck Meat	9,6	5,8	0,0	210,9	216,7	0,0	216,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	21,7	192,87	0,07	0	0,7	0,0	0,1
10 . Jeroan Semua Jenis /Offal All Kind	0,0	1.905,1	0,0	0,0	1.905,1	0,0	1.905,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	190,5	1.695,54	0,64	2	2,2	0,3	0,1
VIII . T E L U R / E G G S																	153,6	10,1	12,3	
1 . Telur Ayam Buras /Local Hen Eggs	-	235,9	0,0	4.847,6	5.083,5	0,0	5.083,5	0,0	1.270,9	0,0	0,0	0,0	196,2	508,4	3.108,07	1,18	3	5,5	0,4	0,4
2 . Telur Ayam Ras /Improved Hen Eggs	-	1.909,3	0,0	30.989,6	32.898,8	0,0	32.898,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	674,4	3.289,9	28.934,53	10,94	30	41,1	3,3	2,9
3 . Telur Itik / Duck Eggs	-	106,0	0,0	1.834,1	1.940,0	0,0	1.940,0	0,0	261,9	0,0	0,0	0,0	76,0	194,0	1.408,07	0,53	1	2,5	0,2	0,2
IX . S U S U / M I L K																	9,8	0,5	0,6	
1 . Susu Sapi / Cow Milk	-	44,8	0,0	0,0	44,8	0,0	44,8	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	4,5	33,29	0,01	0	0,0	0,0	0,0
2 . Susu impor /Imported milk	-	0,0	0,0	17.277,5	17.277,5	0,0	17.277,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.727,7	15.549,72	5,88	16	9,8	0,5	0,6
X . I K A N / F I S H																				
1 . Tuna/Cakalang/Tongkol/Tunas/Skipjade/Eastern titile	-	0,0	0,0	19.491,2	19.491,2	0,0	19.491,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	584,7	1.949,1	16.957,37	6,41	18	14,2	3,0	0,2
2 . Kakapiti/Giant seaperch	-	0,0	0,0	805,3	805,3	0,0	805,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2	80,5	700,65	0,26	1	0,7	0,1	0,0

Jenis Bahan Makanan <i>Commodity</i>	Produksi <i>Production</i> (Ton)		Perubahan Stok <i>Changes in Stock</i>	Penyediaan Provinsi sbl.			Penyediaan Provinsi <i>Available</i>	Pemakaian dalam kabupaten/kota <i>Regencial Utilization</i> (Ton)							Ketersediaan untuk konsumsi per kapita <i>Per Capita Consumption Availability</i>					
	Masukan <i>Input</i>	Keluaran <i>Output</i>		Impor <i>Imports</i>	Ekspor <i>Exports</i>	Ekspor <i>Exports</i>		Diolah untuk <i>Manufacture for</i>	Yang Terececer <i>Waste</i>	Penggunaan Lain <i>Others</i>	Bahan Makanan <i>Food</i>	kg/tn <i>kg/year</i>	gram/hari <i>gram/day</i>	Energi kal/hari <i>cal/day</i>	Protein <i>Proteins</i> gram/day	Lemak <i>Fats</i> gram/day				
			Makanan <i>Food</i>				Bukan Makanan <i>Non Food</i>													
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	3 . . . Cucut/Sharks	-	0,0	0,0	17.640,9	17.640,9	0,0	17.640,9	0,0	0,0	0,0	0,0	529,2	1.764,1	15.347,55	5,80	16	9,1	1,7	0,0
4 . . . Bawal/Pomfret	-	0,0	0,0	2.569,4	2.569,4	0,0	2.569,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	256,9	2.235,40	0,85	2	1,6	0,2	0,1	
5 . . . Teri/Anchovies	-	0,0	0,0	2.987,4	2.987,4	0,0	2.987,4	0,0	0,0	0,0	0,0	89,6	298,7	2.599,07	0,98	3	2,0	0,3	0,0	
6 . . . Lemuru/Indianoil sardinela	-	0,0	0,0	17.640,9	17.640,9	0,0	17.640,9	0,0	0,0	0,0	0,0	529,2	1.764,1	15.347,55	5,80	16	17,8	3,2	0,5	
7 . . . Kembung/Indianmackerels	-	0,0	0,0	11.336,2	11.336,2	0,0	11.336,2	0,0	0,0	0,0	0,0	340,1	1.133,6	9.862,47	3,73	10	11,3	2,0	0,1	
8 . . . Tenggiri/Narrow bard king mackerels	-	0,0	0,0	383,5	383,5	0,0	383,5	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	38,3	333,64	0,13	0	0,2	0,0	0,0	
9 . . . Bandeng/Milk fish	-	0,0	0,0	4.222,3	4.222,3	0,0	4.222,3	0,0	0,0	0,0	0,0	126,7	422,2	3.673,40	1,39	4	4,9	0,8	0,2	
10 . . . Belanak/Multes	-	0,0	0,0	3.700,7	3.700,7	0,0	3.700,7	0,0	0,0	0,0	0,0	111,0	370,1	3.219,65	1,22	3	2,1	0,4	0,1	
11 . . . Mujair/Mozambique tilapia	-	123,0	0,0	10.810,4	10.933,4	0,0	10.933,4	0,0	0,0	0,0	0,0	328,0	1.093,3	9.512,04	3,60	10	8,8	1,8	0,1	
12 . . . Ikan mas/Common carp	-	0,0	0,0	5.464,8	5.464,8	0,0	5.464,8	0,0	0,0	0,0	0,0	163,9	546,5	4.754,40	1,80	5	4,2	0,8	0,1	
13 . . . Udang/Crab/Swim crab	-	0,0	0,0	5.890,5	5.890,5	0,0	5.890,5	0,0	0,0	0,0	0,0	176,7	589,1	5.124,75	1,94	5	4,8	1,1	0,0	
14 . . . Kepiting/Rajungan/Crab/Swim crab	-	0,0	0,0	651,9	651,9	0,0	651,9	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	65,2	567,19	0,21	1	0,7	0,1	0,0	
15 . . . Kerang darah/Blood cockles	-	0,0	0,0	1.700,8	1.700,8	0,0	1.700,8	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0	170,1	1.479,70	0,56	2	1,1	0,2	0,0	
16 . . . Cumi-cumi/Sotong/Common scids dan Cuttle fishes	-	0,0	0,0	3.618,3	3.618,3	0,0	3.618,3	0,0	0,0	0,0	0,0	108,5	361,8	3.147,92	1,19	3	2,4	0,5	0,0	
17 . . . Lainnya/Others	-	1.793,3	0,0	10.434,9	12.228,3	0,0	12.228,3	0,0	0,0	0,0	0,0	366,8	1.222,8	10.638,60	4,02	11	8,4	1,4	0,2	
																	94,4	17,7	1,6	
XI . . . MINYAK /LEMAK																				
1 . . . Kacang Tanah / Minyak Goreng/Cooking Oil	107,6	56,1	0,0	0,0	56,1	0,0	56,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	50,48	0,02	0	0,5	-	0,1	
2 . . . Kopra / Minyak Goreng/Cooking Oil	983,7	344,3	0,0	3.237,1	3.581,4	0,0	3.581,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	358,1	3.145,88	1,19	3	28,4	0,0	3,2	
3 . . . Minyak Sawit/ Palm Oil	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-	-	-	-	-	
4 . . . Minyak Sawit / Minyak Goreng/Palm Oils / Cooking Oils	0,0	0,0	0,0	49.013,2	49.013,2	0,0	49.013,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1.053,8	4.901,3	43.058,06	16,28	45	402,4	-	44,6	
																	431,3	0,0	47,9	
5 . . . Lemak Sapi / Cow Fats	4.089,6	122,7	0,0	0,0	122,7	0,0	122,7	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	12,3	108,60	0,04	0	0,9	0,0	0,1	
6 . . . Lemak Kerbau / Buffalo Fats	17,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,44	0,00	0	0,0	0,0	0,0	
7 . . . Lemak Kambing / Goat Fats	3.346,5	100,4	0,0	0,0	100,4	0,0	100,4	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	10,0	89,36	0,03	0	0,8	0,0	0,1	
8 . . . Lemak Domba / Mutton fats	2.729,4	81,9	0,0	0,0	81,9	0,0	81,9	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	8,2	71,81	0,03	0	0,6	0,0	0,1	
9 . . . Lemak Babi / Pig Fats	5,9	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,52	0,00	0	0,0	-	0,0	
																	2,3	0,0	0,3	
																	433,6	0,0	48,1	
																	Nabati/Vegetal	2.651,2	65,5	63,9
																	Hewani/Animal	309,2	32,1	18,2
																	Jumlah/Total	2.960,5	97,6	82,2